

**ANALISIS POTENSI SEKTOR EKONOMI DAERAH DAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN
WILAYAH BESUKI RAYA TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

Ahmad Ridwan Firmansyah

NIM. 204105020086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**ANALISIS POTENSI SEKTOR EKONOMI DAERAH DAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN
WILAYAH BESUKI RAYA TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Ahmad Ridwan Firmansyah

NIM. 204105020086

Disetujui Pembimbing

an- cvd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.

NIP. 197308301999031002

**ANALISIS POTENSI SEKTOR EKONOMI DAERAH DAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN
WILAYAH BESUKI RAYA TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Ana Pratiwi, M.S.A.

NIP:198809232019032003


Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M.

NUP. 201907180

Anggota :

1. Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M. (

2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. (

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M. Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (Āli ‘Imrān [3]:103)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an Kemenag Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Surah Ali Imran, (3): 103 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, saya ucapkan segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan bagi rasul nabi besar Muhammad SAW, semoga tulisan ini dapat ridho di sisinya dan sebagai tanda terimakasih, Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis Tulus Ikhlas dan Khusnul Holifa, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta memberikan motivasi dan dukungan penuh dalam proses menyusun skripsi ini.
2. Fiola Fadila Isnabil N.I, Saudara kandung perempuan saya yang menjadi penghibur dan penyangga saya dalam proses menyusun skripsi ini.
3. Almamater UIN KHAS Jember dan seluruh teman teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan baik dalam segi fisik, materi dan waktu.
4. Pemilik NIM 204105030009 yang selalu berada dalam kondisi suka maupun duka dan selalu memberi dukungan hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa.
5. Teman- teman baikku yang berada di kontrakan Al-Ikhlas Ajung yang selalu menghibur, mendukung serta membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Organisasi UKM Olahraga (UKOR) UIN KHAS Jember yang membantu saya dalam berproses menjadi seseorang yang bisa berbicara didepan umum semoga organisasi ini bisa berkembang nantinya.

ABSTRAK

Ahmad Ridwan Firmansyah, Dr. Abdul Rokhim, 2024: *Analisis Potensi Sektor Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Wilayah Besuki Raya Tahun 2017-2021*

Kata Kunci : Potensi, Sektor Ekonomi Daerah, Ketimpangan Pendapatan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara atau daerah ingin meningkatkan taraf hidup dan stabilitas politik masyarakatnya.. Dalam upaya pembangunan ekonomi di beberapa wilayah, terutama di wilayah seperti Besuki Raya, tampaknya lebih difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, distribusi pendapatan masih belum merata atau optimal Secara mendasar, pelaksanaan pembangunan ekonomi bisa dinilai dari dua perspektif, yaitu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan kontribusi sektor-sektor yang memengaruhi pertumbuhan tersebut.

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1)Apakah sektor-sektor ekonomi daerah yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki?2) Apakah terjadi ketimpangan pendapatan yang antar Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki?3) Bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki?

Penelitian ini bertujuan untuk 1)mengidentifikasi sektor potensi ekonomi daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 2)mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten. 3)menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik. Kemudian dianalisis dengan Location Quotien, Indeks Williamson, dan Korelasi Pearson.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1)sektor-sektor basis di wilayah karesidenan Besuki Raya di dominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu setiap kabupaten memiliki potensi tersebut. 2)Tingkat ketimpangan antar kabupaten di wilayah karesidenan Besuki Raya tergolong rendah ($<0,5$) yaitu dengan analisis Indeks Williamson rata-rata sebesar 0,129408021. 3)Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan menunjukkan hubungan yang positif namun lemah, dengan nilai korelasi sebesar 0,1258.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Pujian yang memadai nikmat-Nya dan selaras dengan kebaikan-Nya. Maha Pengasih dari segala Pengasih, tanpa segala daya kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, tidak akan pernah mampu diri ini berupaya, tidak akan mampu diri ini berkarya. Sehingga penyusunan karya tulis ini dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW. Yang telah menuntun kami dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yaitu Islam.

Selanjutnya hasil yang telah penulis peroleh ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, MM., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr.H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam.
4. Sofiah, M.E. selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah
5. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
6. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. selaku dosen pembimbing.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan karya tulis ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapat pahala dan balasan dari Allah SWT.

Jember , 13 Juni 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Definisi Operasional	16
G. Hipotesis	17
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu.....	20

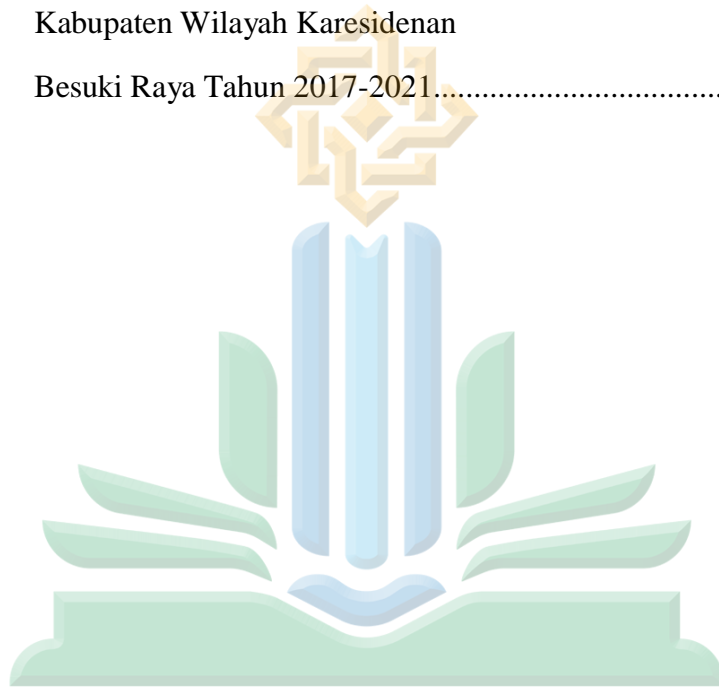
B. Kajian Teori.....	35
1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	35
2. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	36
3. Teori Basis Ekonomi.....	38
4. Sektor-sektor Potensi Ekonomi.....	39
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	40
6. Ketimpangan Wilayah.....	42
7. Ukuran Ketimpangan Wilayah.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Populasi dan Sampel.....	47
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	58
D. Analisis Data.....	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	63
A. Gambaran Objek Penelitian.....	63
B. Penyajian Data.....	58
C. Hasil dan Pengujian Hipotesis.....	64
D. Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sektor dan Sub Sektor Menurut Lapangan Usaha Seri (2010).....	5
Tabel 1.2 Pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021(persen).....	9
Tabel 1.3 Rata-rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Wilayah Besuki Raya Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 (rupiah).....	12
Tabel 2.1 Data Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 PDRB Kabupaten Jember Tahun 2017-2021.....	56
Tabel 4.2 PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021	57
Tabel 4.3 PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021	57
Tabel 4.4 PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021.....	58
Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota 2017-2021.. ..	61
Tabel 4.6 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	62
Tabel 4.7 Sektor-sektor basis Kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki Raya Tahun 2017-2021 Berdasarkan Analisis Location Quotient (LQ)	65
Tabel 4.8 Index Williamson antar Kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki Raya tahun 2017-2021	67
Tabel 4.9 Hasil Analisis Korelasi Pearson Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ketimpangan Tahun 2017-2021	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Wilayah Karesidenan Besuki Raya Tahun 2017-2021.....	59
Gambar 4.2 PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya Tahun 2017-2021.....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika suatu negara atau daerah bermaksud meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas politik masyarakatnya, penting bagi mereka untuk mendorong pembangunan ekonomi yang kokoh. Ini berarti memastikan bahwa penduduk di area tersebut memiliki perekonomian yang kuat dan bisa mencapai tujuan serta keinginan mereka. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didorong agar pendapatan masyarakat umum terus meningkat dari waktu ke waktu dan dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Namun, pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar menekankan aspek ekonomi saja.²

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mengacu pada peningkatan kapasitas perekonomian untuk menciptakan produk dan jasa. Selain itu, hal ini menunjukkan berapa banyak pendapatan tambahan yang dapat dihasilkan oleh perekonomian lokal dalam jangka waktu tertentu bagi masyarakat. Peningkatan pendapatan suatu negara atau produk domestik bruto (PDB) juga dapat dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi. Secara mendasar, pelaksanaan pembangunan ekonomi bisa dinilai dari dua perspektif, yaitu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan kontribusi sektor-sektor yang memengaruhi pertumbuhan tersebut. Potensi ekonomi

² Putri Ramadhani Utami, "Analisis Potensi Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

sangat beragam dan tidak terbatas pada sektor pertanian, namun juga meliputi sektor pariwisata, kerajinan tangan, dan perdagangan (Bawono, 2019). Namun, sayangnya masih banyak masyarakat desa yang belum memanfaatkan potensi ekonomi yang ada.³

Permasalahan yang sering muncul dan sering terjadi di negara-negara non industri adalah kesenjangan finansial atau ketidakseimbangan upah, Indonesia adalah negara agraris. Ketidakseimbangan gaji dapat terjadi antar masyarakat, divisi dan distrik. Terjadinya ketidakseimbangan upah di berbagai daerah disebabkan oleh perbedaan jumlah penduduk, aset yang ada, dan atribut dari daerah yang berbeda. Ketidakseimbangan upah dapat menunjukkan adanya perbedaan upah antara individu di daerah maju dan daerah belum berkembang. Perbedaan di kabupaten-kabupaten ini telah menjadi masalah utama yang mendesak dalam strategi dan kepentingan pemerintah dan masyarakat, terutama karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang berbeda, dan kondisi geologis berdampak pada aktivitas keuangan suatu daerah.⁴

Secara pokok, implementasi pembangunan ekonomi bisa dinilai melalui dua aspek utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor-sektor yang mempengaruhinya. Menurut Pramulyawan, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan membandingkan pendapatan dari berbagai tahun, yang dihitung menggunakan harga berlaku atau harga konstan.

³ Nikmatul Masruroh, Suprianik, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif," *Global Education Journal*, Vol. 1, No.2 (2023): 74.

⁴ Nur Anissa, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 1.

Perubahan dalam nilai pendapatan dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonominya mencapai level yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Proses pembangunan ekonomi dianggap sebagai faktor kunci dan penyebab utama dalam peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan efektif. Jika proses pembangunan ekonomi tidak dijalankan dengan baik, hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam melaksanakan kemandirian daerah, daerah-daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, memikirkan pendekatan perbaikan dan proyek apa yang akan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan bantuan pemerintah daerah dan kemajuan moneter daerah dengan mempertimbangkan kapasitas, aset yang dimilikinya, dan variabel yang berbeda. Pemanfaatan potensi lokal merupakan salah satu langkah selanjutnya dalam keswadayaan masyarakat yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Potensi tersebut meliputi semua potensi yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial.⁵ Strategi dan proyek yang dapat dijalankan adalah dengan memanfaatkan potensi aset

⁵ Siti Masrohatin, Rini Puji Astuti, "Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur," *Journal on Education*, Vol 5, no.4 (2023): 13690.

yang ada di setiap daerah. Dengan demikian, pemerintah provinsi seharusnya mempunyai kemampuan untuk mengakui, menggunakan dan mengawasi secara nyata dan efektif kemampuan menggerakkan daerah dan aset-aset yang dibutuhkannya untuk membantu pembangunan dan kemajuan keuangan.

Salah satu metode yang berguna untuk menganalisis dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah dengan menggunakan metode analisis basis ekonomi. Pendekatan ini mengacu pada teori basis ekonomi yang membagi perekonomian suatu wilayah menjadi dua sektor: sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis merujuk pada sektor ekonomi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berorientasi pada ekspor di luar wilayah perekonomiannya. Sebaliknya, sektor non-basis menyediakan layanan dan produk yang terutama dibutuhkan oleh penduduk di dalam wilayah tersebut. Analisis basis ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat. Pendekatan umum dalam pengembangan ekonomi suatu daerah adalah dengan melakukan analisis terhadap sektor-sektor unggulan. Metode yang sering digunakan untuk menganalisis sektor unggulan dalam suatu daerah adalah melalui metode Location Quotient.

Negara berkembang seperti Indonesia, yang terdiri dari 34 provinsi, di Indonesia memiliki potensi sektor ekonomi kreatif dalam rangka pembangunan ekonomi. Berdasarkan ekonomi kreatif tersebut sebuah wilayah

bisa berkembang dan bisa memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik.⁶ Salah satu provinsi di Jawa Timur tidak terlepas dari keberagaman sektor ekonominya di setiap daerahnya. Namun, seiring dengan keragaman sektor ekonomi di suatu wilayah kabupaten, juga timbul masalah ketimpangan distribusi pendapatan yang tak terelakkan. Setiap wilayah kabupaten memiliki tantangan yang harus diatasi, termasuk persoalan ketimpangan tersebut. Keberadaan lokasi wilayah juga menjadi faktor-faktor yang berpeluang agar sektor-sektor yang di miliki provinsi Jawa Timur memiliki kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Berikut pada tabel 1.1 Sektor Dan Sub Sektor Menurut Lapangan Usaha Seri (2010).

Tabel 1.1

Sektor Dan Sub Sektor Menurut Lapangan Usaha Seri (2010)

Sektor Dan Sub Sektor Menurut Lapangan Usaha Seri (2010)	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	a. Tanaman Pangan b. Tanaman Hortikultura c. Tanaman Perkebunan d. Peternakan e. Jasa Pertanian dan Perburuan
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	
3. Perikanan	
Pertambangan dan Penggalian	
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	
3. Pertambangan Bijih Logam	
4. Pertambangan dan Penggalian	

⁶ Nikmatul Masruroh, Suprianik, “ Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, Vol 13, no.2 (2023): 350.

Lainnya	
Industri Pengolahan	
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	
2. Industri Makanan dan Minuman	
3. Pengolahan Tembakau	
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	
10. Industri Barang Galian bukan Logam	
11. Industri Logam Dasar	
12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	
13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	
14. Industri Alat Angkutan	
15. Industri Furnitur	
16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	
Pengadaan Listrik dan Gas	
1. Ketenagalistrikan	
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	
Konstruksi	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	
1. Perdagangan Mobil, Sepeda	

Motor dan Reparasinya	
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	
Transportasi dan Pergudangan	
1. Angkutan Rel	
2. Angkutan Darat	
3. Angkutan Laut	
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	
5. Angkutan Udara	
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
1. Penyediaan Akomodasi	
2. Penyediaan Makan Minum	
Informasi dan Komunikasi	
Jasa Keuangan dan Asuransi	
1. Jasa Perantara Keuangan	
2. Asuransi dan Dana Pensiun	
3. Jasa Keuangan Lainnya	
4. Jasa Penunjang Keuangan	
Real Estate	
Jasa Perusahaan	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	
Jasa Pendidikan	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.1 dari 34 Kabupaten/Kota yang tersebar di provinsi Jawa Timur terdapat wilayah di bagian timur di provinsi Jawa Timur terdapat beberapa wilayah yang kondisi sektor potensi ekonominya dapat di manfaatkan. Wilayah administratifnya dikenal dengan nama Karesidenan Besuki, bekas (bekas) Karesidenan Besuki, atau daerah tapal kuda meliputi wilayah Jawa Timur bagian timur pada masa Hindia Belanda. Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo semuanya berada pada saat

itu. Nomor Tanda Daftar Kendaraan Bermotor (TNKB) kawasan Eks Karesidenan Besuki diawali dengan huruf P pada sistem penatausahaan kendaraan bermotor. Wilayah Karesidenan Besuki merupakan salah satu penghasil pangan utama Indonesia sebelum masa penjajahan Belanda. Bahan makanan dikirim ke luar Pulau Jawa. Wilayah Besuki sudah tidak mampu lagi menghasilkan pangan dalam jumlah yang banyak ketika Belanda menguasainya. Pertempuran dengan Belanda berujung pada perang berkepanjangan yang mengakibatkan hilangnya lahan pertanian.

Sektor perekonomian wilayah Besuki Raya dan distribusi pendapatan di beberapa kabupatennya mengalami perubahan yang cukup besar antara tahun 2017 hingga tahun 2021. Potensi wilayah khususnya wilayah karesidenan besuki raya berbasis ekonomi kerakyatan perlu untuk digali dan dikaji untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh wilayah yang ada.⁷ Untuk memahami perkembangan ekonomi wilayah dan mengkaji dampaknya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, diperlukan analisis terhadap kapasitas sektor ekonomi dan ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Berikut pada tabel 1.2 disajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten di provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021.

⁷ Nikmatul Masruroh, Agung Parmono, "Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowotengah Sumberbaru Jember Indonesia," *Jurnal Fenomena*, Vol 17, no.2 (2018): 177.

Tabel 1.2
Pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 (persen)

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pacitan	4.98	5.47	5.08	-1.84	2.49
Kabupaten Ponorogo	5.10	5.27	5.01	-0.90	3.19
Kabupaten Trenggalek	5.02	5.03	5.08	-2.17	3.65
Kabupaten Tulungagung	5.08	5.21	5.32	-3.09	3.53
Kabupaten Blitar	5.07	5.10	5.12	-2.29	3.02
Kabupaten Kediri	4.90	5.07	5.06	-2.41	3.06
Kabupaten Malang	5.43	5.55	5.49	-2.68	3.12
Kabupaten Lumajang	5.05	5.00	4.61	-2.79	3.14
Kabupaten Jember	5.11	5.02	5.51	-2.98	4.00
Kabupaten Banyuwangi	5.45	5.84	5.55	-3.58	4.09
Kabupaten Bondowoso	5.03	5.08	5.30	-1.36	3.49
Kabupaten Situbondo	5.07	5.46	5.44	-2.33	3.26
Kabupaten Probolinggo	4.46	4.47	4.56	-2.12	3.35
Kabupaten Pasuruan	5.72	5.73	5.83	-2.03	4.34
Kabupaten Sidoarjo	5.80	6.01	5.99	-3.69	4.21
Kabupaten Mojokerto	5.73	5.88	5.81	-1.11	4.12
Kabupaten Jombang	5.36	5.29	5.10	-1.98	3.24
Kabupaten Nganjuk	5.26	5.38	5.36	-1.71	3.61
Kabupaten Madiun	5.42	5.10	5.42	-0.12	3.32
Kabupaten Magetan	5.09	5.21	5.04	-1.64	3.04
Kabupaten Ngawi	5.07	5.21	5.05	-1.69	2.55
Kabupaten Bojonegoro	10.25	4.39	6.34	-0.40	-5.54
Kabupaten Tuban	4.98	5.15	5.14	-5.85	3.00
Kabupaten Lamongan	5.50	5.44	5.43	-2.65	3.43
Kabupaten Gresik	5.83	5.81	5.42	-3.68	3.79
Kabupaten Bangkalan	3.53	4.22	1.03	-5.59	-2.07
Kabupaten Sampang	4.69	4.11	1.85	-0.29	0.22
Kabupaten Pamekasan	5.04	5.46	4.92	-2.54	3.41
Kabupaten Sumenep	2.86	3.63	0.14	-1.13	2.61
Kota Kediri	5.14	5.43	5.47	-6.25	2.50
Kota Blitar	5.78	5.82	5.84	-2.28	4.28
Kota Malang	5.69	5.72	5.73	-2.26	4.21
Kota Probolinggo	5.88	5.93	5.94	-3.64	4.06
Kota Pasuruan	5.47	5.54	5.56	-4.33	3.64
Kota Mojokerto	5.65	5.80	5.65	-3.69	3.65
Kota Madiun	5.93	5.96	5.69	-5.34	4.79
Kota Surabaya	6.13	6.19	6.09	-4.85	4.29
Kota Batu	6.56	6.50	6.51	-6.46	4.04
Jawa Timur	5,46	5,47	5,53	-2,3	3,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.2 pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur khususnya wilayah Karesidenan Besuki mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari empat Kabupaten yang berada di wilayah Karesidenan Besuki, Kabupaten Banyuwangi yang nilai pertumbuhannya tinggi. Namun, Kabupaten yang berada dalam wilayah Karesidenan Besuki mengalami kemajuan walaupun pertumbuhan ekonomi di setiap tahunnya naik turun.

Kontribusi sektor-sektor ekonomi penting seperti pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata terhadap PDB kabupaten di wilayah Besuki Raya diperkirakan akan berubah pada saat ini. Problem yang ada di masyarakat Blimbingsari, dalam pengembangan industri kreatif berbasis lokal tentunya sangat butuh adanya sentuhan peran dari pihak-pihak terkait seperti: pemerintah atau pejabat terkait yang dimaksud adalah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) sebagai penyokong dalam publikasi terhadap kemajuan dan keunikan daerah.⁸ Perkembangan industri-industri ini mungkin dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti investasi, kemajuan teknis, dan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, analisis kesenjangan pendapatan juga penting untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar kelas sosial. Dengan memahami dinamika ini, akan lebih memungkinkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di kabupaten wilayah besuki raya untuk

⁸ Siti Masrohatin, Hikmatul Hasanah, Vina Rahmadiyah, “ Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Lokal Sektor Kerajinan Monte Dengan Model Triple Helix Di Blimbingsari Banyuwangi,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3, no. 2 (2023): 216.

merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, seperti pengembangan sektor unggulan dan program penanggulangan ketimpangan ekonomi.

Dalam upaya pembangunan ekonomi di beberapa wilayah, terutama di wilayah seperti Besuki Raya, tampaknya lebih difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, distribusi pendapatan masih belum merata atau optimal. Distribusi pendapatan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Pendapatan yang merata di suatu daerah akan meningkatkan nilai PDRB dan pendapatan per kapita wilayah tersebut. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di wilayah tersebut, termasuk di Besuki Raya, Provinsi Jawa Timur, di mana sektor ekonominya sangat beragam.

Kabupaten/kota wilayah Besuki Raya provinsi Jawa Timur mengalami kemajuan dalam perekonomiannya. Meskipun demikian, ketidakmerataan distribusi pendapatan antara kabupaten/kota menjadikan wilayah Besuki Raya di Provinsi Jawa Timur masih menghadapi masalah ketimpangan pendapatan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan bisa dilihat dari seberapa besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, karena indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Rata-rata PDRB perkapita Kabupaten/kota di wilayah Besuki Raya provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 akan disajikan pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Rata-rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Wilayah Besuki Raya Provinsi
Jawa Timur Tahun 2017-2021 (ribu rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata PDRB Per kapita
1	Kabupaten Jember	30.108,6
2	Kabupaten Banyuwangi	48.532
3	Kabupaten Bondowoso	24.910,6
4	Kabupaten Situbondo	28.635,8
	Provinsi Jawa Timur	57.195,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diolah

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa PDRB kabupaten wilayah Karesidenan Besuki Raya belum merata seluruhnya. Ada kabupaten yang mampu memperoleh PDRB per kapita yang mendekati PDRB per kapita provinsi Jawa Timur, dan ada juga yang hanya mampu mendapatkan PRDB per kapita rendah bahkan kurang dari separuh nilai PDRD provinsi Jawa Timur. Berdasarkan PDRB per kapita, terlihat bahwa terdapat ketidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan pendapatan antara kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki Raya.r. Berdasarkan indikator PDRB per kapita dapat dikatakan bahwa terdapat ketidakmerataan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki Raya.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, penting untuk tidak hanya fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memprioritaskan distribusi pendapatan yang merata sebagai bagian penting dari tujuan pembangunan ekonomi. Pemerintah provinsi dan daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Meskipun

sulit untuk menghilangkan sepenuhnya ketimpangan pendapatan, upaya untuk menguranginya sangat penting karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang masalah ini, sehingga penulis memilih judul **“Analisis Potensi Sektor Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Wilayah Besuki Raya Tahun 2017-2021”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sektor-sektor ekonomi daerah yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki?
2. Apakah terjadi ketimpangan pendapatan yang antar Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki?
3. Bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki.
2. Mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antara Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki Raya.
3. Menganalisis korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di antara Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki Raya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diantaranya :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang mengangkat permasalahan tersebut dan dapat memperluas pandangan keilmuan dalam memahami sektor ekonomi daerah di wilayah regional yang ada di Indonesia.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama pada mahasiswa yang ingin mempermudah penelitian di perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi.

a. Bagi peneliti

Dalam hal penelitian diharapkan penulis dapat menambah atau mengembangkan pengetahuan potensi sektor-sektor ekonomi daerah dan ketimpangan pendapatan di wilayah regional Karesidenan Besuki Raya.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini sebagai langkah awal guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai potensi sektor ekonomi dan ketimpangan pendapatan wilayah regional.

c. Bagi Pemerintah

Analisis potensi sektor ekonomi dan ketimpangan pendapatan akan memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk

merancang kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi setiap kabupaten.

d. Bagi peneliti lain

Sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut topik yang sama atau topik terkait di provinsi-provinsi lain di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini mengulas tentang sektor-sektor potensial dalam ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen (X), serta ketimpangan pendapatan antar daerah sebagai variabel dependen (Y), bersamaan dengan analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

2. Indikator Variabel

Indikator variabel untuk mengukur penelitian tersebut yaitu :

- a. Sektor-sektor Ekonomi Daerah
- b. Pertumbuhan Ekonomi
- c. Produk Domestik Regional Bruto
- d. Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan tentang suatu variabel yang didasarkan pada sifat-sifat yang dapat diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengamati objek atau fenomena dengan teliti.⁹

1. Sektor ekonomi daerah merujuk pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan ekspor barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.¹⁰
2. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah parameter ekonomi yang signifikan dalam mengilustrasikan peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara dalam periode waktu tertentu.¹¹
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari segala kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.¹²
4. Ketimpangan pendapatan antar daerah adalah suatu kondisi dimana ketidakmerataan pendapatan dalam proses kegiatan ekonomi suatu daerah.¹³

⁹ Nurdin Ismail dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 122.

¹⁰ Intan Andriyani Wijaya, Marseto, "Analisis Potensi Sektor Ekonomi (location quotient, shift share, dan tipology klassen)," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol 19, no.1 (2022): 63-70.

¹¹ Merdita Manik, "Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Vol 23, no.2 (2022): 13-20.

¹² Tri Nita Hartini, "Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi DIY Tahun 2011-2015," *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* Vol 6, no.6(2017): 530-539.

¹³ Meliza Murtala, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* Vol 3, no.1 (2020): 28-38.

G. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban awal dalam rumusan penelitian yang mengartikulasikan pertanyaan penelitian dalam bentuk kalimat. Jawaban ini bersifat sementara karena hanya didasarkan pada teori yang ada dan belum disokong oleh fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.¹⁴

Terdapat perbedaan sektor ekonomi daerah dengan analisis *Location Quotient* (LQ) dilakukan oleh Putri Ramadhani Utami menghasilkan kesimpulan bahwa sektor ekonomi yang berpengaruh dalam pembentukan nilai total pertumbuhan ekonomi dalam 8 kabupaten di Provinsi Banten masing-masing berbeda di setiap kabupaten,¹⁵ pada penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah :

1. H_0 : Tidak terdapat perbedaan sektor ekonomi daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya.
- H_1 : Terdapat perbedaan sektor ekonomi daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya.

Terdapat ketimpangan pendapatan dengan analisis Indeks Williamson dilakukan oleh Meliza dan Murtala menghasilkan kesimpulan

¹⁴ Mudrajad Kuncoro dkk., *Jawa Tengah Melawan Pandemi Dan Resesi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 133-134.

¹⁵ Putri Ramadhani Utami, "Analisis Potensi Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 64.

bahwa terdapat ketimpangan pendapatan yang tinggi di Provinsi Aceh,¹⁶ pada penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah :

2. H_0 : Tidak terdapat ketimpangan pendapatan yang antar Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki Raya.

H_2 : Terdapat ketimpangan pendapatan yang antar Kabupaten di Wilayah Besuki Raya.

Baiq Wihan Sirtama melakukan penelitian terhadap hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan Indeks Williamson. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, namun korelasi tersebut relatif lemah.¹⁷ pada penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah ;

3. H_0 : Tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki Raya

H_3 : Terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki Raya.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis merupakan langkah dalam proses penmbuatan tugas akhir ini. yaitu :

¹⁶ Meliza, Murtala, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* Vol 3, No.1 (2020) : 37.

¹⁷ Baiq Wihan Sirtama, " Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemuktian Hipotesis Kuznets)," *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang* Vol 5, No.4 (2021) : 662.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup penjelasan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, cakupan penelitian, definisi operasional, hipotesis, dan pengaturan isi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini memuat beberapa referensi dari penelitian terdahulu dan teori yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, sumber dan jenis data yang digunakan, instrumen pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bagian ini berisi deskripsi dari objek penelitian, presentasi data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini mencakup kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran Berdasarkan Hasil kesimpulan yang didapat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis juga mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa. Berikut beberapa studi terdahulu yang telah diteliti.:

1. Skripsi Nur Annisa pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.”¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terhadap disparitas pendapatan di Indonesia. Metode yang diterapkan adalah *Partial Least Squares (PLS)* dengan model *fixed effect*. Data yang digunakan meliputi rangkaian waktu dari tahun 2015 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap disparitas pendapatan di Indonesia selama periode 2015-2020, sementara tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam periode yang sama.

2. Skripsi Miftahul Hairatul Jannah pada tahun 2022 dengan judul “Analisis tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020.”¹⁹

¹⁸ Nur Annisa, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2016 hingga 2020. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan pendapatan asli daerah. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data panel menggunakan pendekatan *random effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap ketidakmerataan pembangunan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketidakmerataan pembangunan ekonomi, sedangkan jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2016-2020.

3. Skripsi Agissa Melatica Yulianti pada tahun 2022 dengan judul “Analisis fakto-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota administrasi provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2019.”²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi disparitas pendapatan di kabupaten/kota administratif

¹⁹ Miftahul Hairatul Jannah, “Analisis Tingkat Ketimpangan Pembnagunan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022).

²⁰ Agissa Melatica Yulianti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2019” (Skripsi, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2022).

Provinsi DKI Jakarta selama periode 2005-2019. Variabel yang diteliti meliputi PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Metode analisis yang diterapkan adalah regresi data panel menggunakan perangkat lunak Stata 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh signifikan dan menunjukkan arah positif terhadap disparitas pendapatan, sementara PDRB per kapita kuadrat juga tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah positif. IPM menunjukkan pengaruh positif terhadap disparitas pendapatan, sedangkan TPT menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan.

4. Jurnal Shinta Iffah Rosyidah pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis potensi sektor ekonomi pada kabupaten dan kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kabupaten/kota yang memiliki PDRB dan potensi ekonomi yang unik. Hal ini membantu suatu daerah untuk meningkatkan daya saing wilayahnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui sektor unggulan di kabupaten/kota di DIY selama tahun 2018-2021. Berdasarkan hasil analisis LQ yang diperoleh, terdapat berbagai sektor fundamental, antara lain tujuh sektor di Kabupaten Sleman, enam sektor di Kabupaten Bantul, sebelas sektor di Kota Yogyakarta,

²¹ Shinta Iffah Rosyidah, “Analisis Potensi Sektor Ekonomi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Ekonomi* Vol27, No.3 (2022): 296-316.

delapan sektor di Kabupaten Kulonprogo, dan tujuh sektor di Kabupaten Gunungkidul. Beberapa sektor dalam analisis *Shift Share* menunjukkan hasil positif dan negatif. Ada sektor-sektor di kuadran I, II, III, dan IV sesuai dengan hasil analisis tipologi Klassen.

5. Jurnal Ilmu Ekonomi Baiq Wihan Sirtama (2021) dengan judul “Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di provinsi Nusa Tenggara Barat (pembuktian hipotesis kuznets).”²²

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat disparitas pendapatan, menggali hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan, serta menguji Hipotesis Kuznets. Metode yang diterapkan mencakup penggunaan Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Korelasi Pearson, dan Hipotesis Kuznets. Hasil analisis menunjukkan tingkat ketidakmerataan pendapatan yang rendah antara kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 2001-2020, dengan nilai 0,22 dan 0,02 untuk Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil. Korelasi Pearson antara Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode yang sama menunjukkan hubungan yang ada, namun cukup lemah dengan nilai antara 0,257 dan 0,303. Analisis grafis menunjukkan pola hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan yang membentuk pola U terbalik, menunjukkan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan meningkat, yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

²² Baiq Wihan Sirtama, “ Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemuktian Hipotesis Kuznets),” Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Vol 5, No.4 (2021).

6. Skripsi Atifah Esti Pratiwi pada tahun 2021 dengan judul “Analisis pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan regional antar kota/kabupaten di provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019.”²³

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi antara kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang diterapkan adalah data panel dengan menggunakan pendekatan *random effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2015-2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mencapai 5,49%. Namun, tingkat ketidakmerataan pendapatan regional antar kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur dinilai tinggi.

7. Jurnal Muhammad Agus Muljanto pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis sektor unggulan dalam pembangunan daerah di kabupaten Sidoarjo”²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai sektor pembangunan, untuk itu diperlukan analisis terhadap sektor yang menjadi basis pembangunan ekonomi dan sektor unggulan yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi wilayah serta sektor unggulan tersebut menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Penggunaan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang menggambarkan fenomena mengenai hal apa yang dialami oleh objek penelitian dengan

²³ Atifah Esti Pratiwi, “Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pendapatan Regional Antar Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019” (Skripsi, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2021).

²⁴ Muhammad Agus Muljanto, “Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol5, No.2 (2021): 169-181.

menggunakan angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan 14 sektor memiliki prospektif dalam pembangunan daerah dan 1 sektor diantaranya menjadi sektor unggulan sebagai prioritas dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo, yaitu sektor Industri Pengolahan. Untuk itu strategi perencanaan pembangunan yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi wilayah dapat dilakukan dengan memberikan prioritas tinggi kepada sektor Industri Pengolahan.

8. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinda Syahri dan Yesy Gustira pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara periode 2015-2019.”²⁵

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efek pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara terhadap disparitas pendapatan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif menggunakan teknik regresi linier berganda dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015-2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara. Di sisi lain, tingkat kemiskinan menunjukkan pengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan secara

²⁵ Dinda Syahri, Yesy Gustiara, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Utara Periode 2015-2019,” *Independent: Journal of Trends Economics and Accounting Research* Vol 1, no. 1 (2020): 34.

bersama-sama berdampak pada kesenjangan pendapatan di Sumatera Utara selama periode 2015-2019.

9. Skripsi Sandre Surmana Sembiring pada tahun 2020 dengan judul “Analisis ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.”²⁶

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam ketidakmerataan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Variabel yang diteliti meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi data panel yang diproses menggunakan perangkat lunak *Eviews*. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder time series dan *cros section*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk secara signifikan mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan. Secara spesifik, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan, sementara jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

²⁶ Sandre Surmana Sembiring, “Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara” (Skripsi, Universitas Jember, 2020).

10. Skripsi Putri Ramadhani Utami pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis potensi ekonomi daerah dan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di provinsi Banten tahun 2011-2015.”²⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi daerah yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, mengklasifikasikan kondisi pertumbuhan ekonomi, menilai tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota, serta mengamati korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki sektor basis yang beragam, masing-masing memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor basis ini, yang didominasi oleh Sektor Jasa Pendidikan yang ada di lima kabupaten/kota, mencerminkan potensi ekonomi setiap wilayah. Analisis tipologi klassen menunjukkan bahwa hanya satu kabupaten/kota yang termasuk ke dalam daerah maju (Kuadran I), sedangkan empat kabupaten/kota lainnya termasuk dalam kategori relatif tertinggal (Kuadran IV). Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten dinilai tinggi, dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,7667 pada tahun 2011 dan 0,7774 pada tahun 2015. Korelasi Pearson antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menunjukkan hubungan negatif, dengan tingkat korelasi sebesar 78,3%.

²⁷ Putri Ramadhani Utami, “Analisis Potensi Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Tabel 2.1
Data Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nur Annisa (2022)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap disparitas pendapatan di Indonesia selama periode 2015-2020, sementara tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam periode yang sama.	Menggunakan metode PLS. Menggunakan model <i>fixed effect model</i>
2	Miftahul Hairatul Jannah (2022)	Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap ketidakmerataan pembangunan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketidakmerataan pembangunan ekonomi, sedangkan jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan Dana Alokasi Umum	Metode yang digunakan yaitu data panel. Pendekatan <i>random effect</i>

			(DAU) memiliki pengaruh positif terhadap ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2016-2020.	
3	Agissa Melastica Yulianti (2022)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi Dki Jakarta Tahun 2005-2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh signifikan dan menunjukkan arah positif terhadap disparitas pendapatan, sementara PDRB per kapita kuadrat juga tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah positif. IPM menunjukkan pengaruh positif terhadap disparitas pendapatan, sedangkan TPT menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan.	Metode yang digunakan yaitu data panel.
4	Shinta Iffah Rosyidah (2022)	Analisis potensi sektor ekonomi pada kabupaten dan kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Berdasarkan hasil analisis LQ yang diperoleh, terdapat berbagai sektor fundamental, antara lain tujuh sektor di Kabupaten Sleman, enam sektor di Kabupaten Bantul, sebelas sektor di Kota Yogyakarta,	Metode deskriptif Kuantitatif, Analisis LQ, Analisis Shift Share

			<p>delapan sektor di Kabupaten Kulonprogo, dan tujuh sektor di Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>Beberapa sektor dalam analisis Shift Share menunjukkan hasil positif dan negatif. Ada sektor-sektor di kuadran I, II, III, dan IV sesuai dengan hasil analisis tipologi Klassen.</p>	
5	Baiq Wihan Sirtama (2021)	<p>Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pembuktian Hipotesis Kuznets)</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan tingkat ketidakmerataan pendapatan yang rendah antara kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 2001-2020, dengan nilai 0,22 dan 0,02 untuk Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil. Korelasi Pearson antara Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode yang sama menunjukkan hubungan yang ada, namun cukup lemah dengan nilai antara 0,257 dan 0,303. Analisis grafis menunjukkan pola hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan</p>	<p>Metode yang digunakan Kuantitatif, Dengan pendekatan secara deskriptif . Dengan bantuan software <i>Eviews</i>.</p>

			Ketimpangan Pendapatan yang membentuk pola U terbalik, menunjukkan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan meningkat, yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi.	
6	Atifah Esti Pratiwi (2021)	Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pendapatan Regional Antar Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2015-2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mencapai 5,49%. Namun, tingkat ketidakmerataan pendapatan regional antar kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur dinilai tinggi.	Metode yang digunakan menggunakan pendekatan <i>random effect</i> . Data yang digunakan yaitu data panel.
7	Muhammad Agus Mujanto (2021)	Analisis sektor unggulan dalam pembangunan daerah di kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian menunjukkan 14 sektor memiliki prospektif dalam pembangunan daerah dan 1 sektor diantaranya menjadi sektor unggulan sebagai prioritas dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo, yaitu sektor Industri Pengolahan. Untuk itu strategi perencanaan pembangunan yang	Metode Deskriptif Kuantitatif

			berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi wilayah dapat dilakukan dengan memberikan prioritas tinggi kepada sektor Industri Pengolahan.	
8	Dinda Syahri dan Yessy Gustira (2020)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Utara Periode 2015-2019	Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara. Di sisi lain, tingkat kemiskinan menunjukkan pengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama berdampak pada kesenjangan pendapatan di Sumatera Utara selama periode 2015-2019.	Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Data time series 2015-2019.
9	Sandre Sumana Sembiring (2020)	Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk secara	Metode yang digunakan yaitu regresi data panel. Data yang digunakan yaitu <i>time series</i> dan <i>crosssection</i> . Menggunakan alat bantu software

			<p>signifikan mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan. Secara spesifik, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan, sementara jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.</p>	<i>Eviews.</i>
10	Putri Ramadhani Utami (2018)	Analisis Potensi Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki sektor basis yang beragam, masing-masing memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor basis ini, yang didominasi oleh Sektor Jasa Pendidikan yang ada di lima kabupaten/kota,</p>	<p>Metode yang digunakan kuantitatif. Menggunakan data deskriptif</p>

			<p>mencerminkan potensi ekonomi setiap wilayah. Analisis tipologi klassen menunjukkan bahwa hanya satu kabupaten/kota yang termasuk ke dalam daerah maju (Kuadran I), sedangkan empat kabupaten/kota lainnya termasuk dalam kategori relatif tertinggal (Kuadran IV). Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten dinilai tinggi, dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,7667 pada tahun 2011 dan 0,7774 pada tahun 2015. Korelasi Pearson antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menunjukkan hubungan negatif, dengan tingkat korelasi sebesar 78,3%.</p>	
--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

Jadi, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengadopsi metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui cross-section dan time series. Analisis

data dilakukan menggunakan alat-alat seperti *Location Quotient* (LQ), Tipologi Klassen, Index Williamson, dan Korelasi Pearson.

B. Kajian Teori

1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan merupakan suatu rangkaian perubahan yang melibatkan aspek-aspek beragam seperti struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional. Hal ini juga meliputi upaya mengurangi ketimpangan pendapatan serta mengatasi kemiskinan. Pembangunan ekonomi, di sisi lain, adalah proses meningkatnya pendapatan secara keseluruhan dan pendapatan per individu dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi, dan juga mengalami perubahan struktural fundamental dalam perekonomian suatu negara, serta upaya untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan di antara penduduknya.²⁸

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi saling terkait erat.

Pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kemampuan produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional. Suatu negara dianggap mengalami pertumbuhan ekonomi ketika terjadi peningkatan nyata dalam GNP (*Gross National Product*) di negara tersebut.²⁹ Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh

²⁸ Putu Ayu Paramitha Purwanti, Ni Putu Wiwin Setyari, "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Kawasan Strategis SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan)," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 18, no.2 (2021): 189-200.

²⁹ Purwanti, Setyari, "Pertumbuhan Ekonomi," 192.

beberapa faktor yang tidak dapat diabaikan, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhinya, yaitu:

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merujuk pada individu yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang aktif bekerja, mencari pekerjaan, atau terlibat dalam kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan.

b. Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Angka ketergantungan adalah perbandingan antara dua kelompok penduduk yang belum atau tidak lagi produktif secara ekonomis, yaitu kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia 65 tahun ke atas, dengan kelompok usia produktif.³⁰

c. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merujuk pada perubahan jumlah individu dalam suatu populasi dalam periode tertentu. Hal ini merupakan faktor penting dalam masalah sosial ekonomi karena dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.³¹

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang tersedia dan membentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang

³⁰ Sitindaon, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi," 17.

³¹ Sitindaon, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi," 18.

pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.³². Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, menciptakan peluang kerja untuk penduduk yang ada saat ini.
- b. Kedua, meningkatkan ekonomi di tingkat regional.
- c. Ketiga, diversifikasi basis ekonomi dan kesempatan kerja.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi daerah memerlukan strategi pengembangan yang efektif dan terfokus untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang digunakan³³, yaitu :

- a. *Location Quotient* (LQ)

Metode *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menemukan sektor-sektor basis dan non-basis dengan tujuan untuk mengevaluasi kepentingan suatu daerah dalam sektor-sektor potensial. Teknik ini membandingkan aktivitas ekonomi daerah dengan ekonomi nasional untuk mengidentifikasi spesialisasi ekonomi regional. Analisis LQ juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur tingkat konsentrasi kegiatan industri dalam suatu daerah dengan menggunakan PDRB

³² Susie Suryani, Nawarti Bustamam, "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau," *Jurnal Ekonomi Kiat* Vol 32, no.2 (2021): 151-152.

³³ Suryani, dan Bustamam, "Potensi Pengembangan Pariwisata," 151-152.

sebagai variabel untuk menilai kontribusi suatu kegiatan dalam struktur ekonomi regional.³⁴

b. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal sambil menghindari masalah yang dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi melalui penerapan otonomi daerah yang komprehensif, yang tetap mempertahankan kesinambungan kebijakan anggaran nasional, dan tetap memperhatikan kelangsungan pelayanan publik.³⁵

3. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) yang di kemukakan oleh John Glasson, menerangkan bahwa Menjelaskan bahwa ada hubungan antara sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah dengan kekuatan yang mendorong salah satu sektor mempengaruhi sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Jhon Glasson, perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan basis dan kegiatan non-basis. Kegiatan basis adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa, serta menjual atau memasarkan produknya di luar daerah. Sementara itu, kegiatan non-basis adalah kegiatan ekonomi yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan

³⁴ Sephen Dwi Aura Jagad Setya Dewinta, Kiky Asmara, “ Pengaruh Sektor-sektor Potensial Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol10, no.2 (2022): 292.

³⁵ Sephen Dwi Aura Jagad Setya Dewinta, Kiky Asmara, “ Pengaruh Sektor-sektor Potensial Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol10, no.2 (2022): 292.

lokal di wilayah ekonomi setempat. Kegiatan ekonomi non-basis tidak menghasilkan produk untuk diekspor keluar daerahnya, sehingga cakupan produksi mereka dan pasarannya tetap lokal. Menurut teori ini, peningkatan jumlah kegiatan ekonomi basis di suatu daerah akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Ini kemudian akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di daerah tersebut dan mendorong peningkatan volume kegiatan ekonomi non-basis (multiplier effect). Sebaliknya, jika jumlah kegiatan basis mengalami penurunan, akan mengakibatkan penurunan pendapatan yang masuk ke daerah tersebut. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh kegiatan ekonomi non-basis.³⁶

4. Sektor – Sektor Potensi Ekonomi

Sektor unggulan adalah sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Sektor-sektor utama ini biasanya tumbuh lebih cepat daripada sektor-sektor lain di wilayah tersebut. Secara khusus, sektor-sektor yang paling penting adalah yang mendukung akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Dengan memperkuat potensi sektor-sektor utama yang dimiliki oleh daerah tersebut, dapat

³⁶ Sephen Dwi Aura Jagad Setya Dewinta, Kiky Asmara, “ Pengaruh Sektor-sektor Potensial Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol10, no.2 (2022).

meningkatkan kemajuan ekonomi wilayah tersebut.³⁷ Sektor terbagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Sektor basis

Sektor basis adalah sektor-sektor yang menjual barang-barang dan jasa ke luar daerah ekonomi lokal mereka, dan mereka juga mengimpor barang-barang dan jasa dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalamnya.

b. Sektor non basis

Sektor non-basis adalah sektor-sektor yang menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh penduduk di dalam wilayah ekonomi mereka. Mereka tidak menjual barang-barang mereka ke luar daerah dan fokus utamanya adalah pada pasar lokal.

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB mencakup nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam suatu wilayah atau total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada akhir periode tertentu. Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di suatu daerah selama periode waktu tertentu.³⁸

³⁷ Sephen Dwi Aura Jagad Setya Dewinta, Kiky Asmara, “ Pengaruh Sektor-sektor Potensial Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol10, no.2 (2022): 292.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah total pembayaran yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu..³⁹

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah agregat dari semua elemen permintaan akhir, yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi modal, ekspor bersih, dan perubahan dalam inventaris.⁴⁰

Perhitungan PDRB memiliki dua format, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).⁴¹ PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai acuan.⁴² Sementara PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.⁴³ PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku membantu dalam memahami perubahan dan struktur ekonomi.⁴⁴

³⁸ Logaritma, 6.

³⁹ Logaritma, 6.

⁴⁰ Sandra Logaritma, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2015-2019 (Jakarta: BPS RI, 2020), 6-7.

⁴¹ Logaritma, 6.

⁴² Logaritma, 6.

⁴³ Logaritma, 6.

⁴⁴ Logaritma, 6.

6. Ketimpangan Wilayah

Perbedaan antar wilayah adalah fenomena umum dalam ekonomi suatu daerah. Potensi suatu daerah bisa menjadi motor penggerak berbagai upaya perbaikan. Terdapat ketidakseimbangan antara wilayah-wilayah ini dalam konteks usulan bantuan pemerintah antarkabupaten..⁴⁵ Ketimpangan cenderung lebih tinggi di negara-negara non-industri, sementara di negara maju, tingkat ketimpangan relatif lebih rendah. Di negara agraris, kesenjangan seringkali tinggi karena ketika proses pembangunan dimulai, kemungkinan perbaikan sudah dimanfaatkan oleh wilayah-wilayah dengan kondisi yang buruk, meninggalkan wilayah yang belum matang. Wilayah-wilayah ini mungkin tidak dapat memanfaatkan peluang secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Sentralisasi dalam pelaksanaan keuangan juga berperan dalam tingginya perbedaan moneter di tingkat provinsi..⁴⁶ Perbaikan ekonomi harus terjadi secara merata, tidak hanya di wilayah metropolitan tetapi juga di daerah kabupaten lokal. Misalnya, di wilayah metropolitan, aktivitas industri, pasar keuangan, dan administrasi mungkin mendominasi, sementara di daerah, sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan mungkin menjadi fokus utama. Evaluasi ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah bisa

⁴⁵ Hendrikus Darmayanto, “ Analisis Ketimpangan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020” (Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022),10.

⁴⁶ Hendrikus Darmayanto, “ Analisis Ketimpangan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020” (Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022),9.

menggunakan data seperti Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk di setiap kabupaten atau kota..⁴⁷ Perbedaan dalam aktivitas ekonomi antar wilayah bisa menciptakan disparitas dalam perkembangan ekonomi, dengan beberapa wilayah mengalami pertumbuhan yang pesat sementara yang lain menghadapi hambatan. Fokus pada kondisi lokal penting, termasuk pengukuran ketimpangan antar wilayah, yang sebaiknya dilakukan secara independen untuk wilayah lokal maupun perkotaan, sehingga perbedaannya tergambar dengan jelas.⁴⁸ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ketimpangan wilayah antara lain :

1. Kepemilikan Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) merujuk pada semua hal yang diperoleh dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara konseptual, SDA dibagi menjadi dua kategori: yang dapat diperbaharui, seperti air, tanah, tumbuhan, dan hewan, serta yang tidak dapat diperbaharui, seperti pasir laut, emas, minyak bumi, batu bara, nikel, timah, dan sebagainya. Pengelolaan SDA sangat bergantung pada kepemilikan yang terkait dengan jenis SDA tersebut. Menurut pandangan penulis, yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, terdapat tiga jenis kepemilikan terhadap SDA: kepemilikan pribadi, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Kepemilikan pribadi adalah milik individu (rumah, mobil, lahan pertanian, toko, dsb.), kepemilikan negara adalah milik yang menjadi aset negara (mobil

⁴⁷ Darmayanto, "Analisis Ketimpangan,"11.

⁴⁸ Darmayanto, "Analisis Ketimpangan,"12.

dinas, gedung kantor, infrastruktur umum, dsb.), sedangkan kepemilikan umum adalah milik bersama masyarakat, bukan milik individu atau negara.⁴⁹

2. Ketersediaan Infrastruktur

Kehadiran infrastruktur publik sangat vital dalam tahap pembangunan ekonomi. Infrastruktur tidak hanya memberikan kontribusi langsung tetapi juga tidak langsung terhadap perekonomian, mempercepat pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk merincikan kemajuan infrastruktur publik di Indonesia dan mengevaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini.⁵⁰

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merujuk pada tenaga kerja yang memiliki kesiapan, kemampuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pengetahuan, keahlian, dan kemampuan individu yang dapat digunakan untuk memberikan layanan profesional.⁵¹

4. Perbedaan Kondisi Demografis Antar Daerah

Berbagai faktor juga menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar kabupaten, yang merupakan tempat di mana terdapat perbedaan signifikan dalam kondisi demografis antar wilayah. Faktor-faktor

⁴⁹ Hendrikus Darmayanto, “ Analisis Ketimpangan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020” (Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022),11.

⁵⁰ Darmayanto, “Analisis Ketimpangan,”11.

⁵¹ Hendrikus Darmayanto, “ Analisis Ketimpangan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020” (Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022),11.

tersebut meliputi perbedaan dalam tingkat pembangunan dan perkembangan masyarakat, variasi dalam tingkat pendidikan dan kesejahteraan, perbedaan dalam kondisi bisnis, serta variasi dalam perilaku, kecenderungan, dan sikap kerja keras yang dipersepsikan oleh jaringan sosial setempat. Kondisi-kondisi ini berpotensi meningkatkan disparitas antar lokasi karena mereka dapat memengaruhi efisiensi kerja di wilayah-wilayah terkait. Wilayah-wilayah dengan kondisi yang kurang menguntungkan cenderung memiliki tingkat efisiensi kerja yang lebih tinggi, yang dapat mendorong ekspansi usaha dan pembukaan peluang kerja serta pengembangan keuangan di daerah tersebut. Sebaliknya, jika suatu wilayah memiliki kondisi yang kurang baik, hal ini dapat mengurangi efisiensi kerja lokal, menyebabkan lingkungan yang kurang menguntungkan dan mendorong spekulasi, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi daerah tersebut.⁵²

7. Ukuran Ketimpangan Wilayah

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan adalah melalui Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah alat ukur ketimpangan antar wilayah yang diperkenalkan pertama kali oleh Jeffrey G Williamson pada tahun 1996. Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk sebagai data dasar karena yang dievaluasi adalah tingkat pembangunan di

⁵² Puti Andiny, Nursani Adelida, Rahmi Meutia, “ Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota (Studi Kasus Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa),” *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol 3, no.1 (2019): 41-56.

antara wilayah-wilayah tersebut. Rumus Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y}$$

dimana:

V_w : indeks williamson

Y_i : PDRB perkapita di kabupaten dan kota

y : PDRB perkapita rata-rata kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur

f_i : jumlah penduduk di kabupaten dan kota i

n : jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur

Pengertian Indeks Williamson apabila nilai hasil perhitungan indeks williamson semakin tinggi dan mendekati angka satu maka ketimpangan dikategorikan tinggi dan begitu juga sebaliknya, apabila nilai hasil perhitungan indeks williamson semakin rendah dan menjauh dari angka satu maka ketimpangan dikategorikan rendah. ($0 < V_w < 1$).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Prof. DR Sugiyono dalam bukunya "Metode Penelitian Bisnis" penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang dimulai dari konsep abstrak yang diberikan fokus dengan menggunakan dasar teori, kemudian dirumuskan hipotesis yang diuji untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkret.⁵³ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif terjadi ketika peneliti hanya menguji hubungan antar variabel sekali.

Penelitian ini akan mengulas sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi di wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah, dan korelasi antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah pada total individu atau elemen yang menjadi subjek penelitian. Dalam konteks yang berbeda, definisi populasi juga mencakup seluruh variabel yang terkait dengan topik penelitian. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini mencakup semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dengan sampel yang terdiri dari empat kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki Raya.

⁵³ Prof.Dr.H.M. Sidik Priadana MS dan Denok Sunarsih, S.Pd., M.M. Cht., Metode Penelitian Kuantitatif (Tangerang Selatan: Pascal Books,2021),51.

Penelitian ini menggunakan metode sampling probabilitas, atau random sampling, yang memberikan setiap anggota populasi peluang yang sama untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel penelitian ini terdiri data yang diambil dari 4 kabupaten dalam data cross-section dan data time series dari periode 2017-2021 selama 5 tahun.

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Riduwan, metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁵⁴ Data kuantitatif adalah data numerik yang dapat dihitung dengan akurat.⁵⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau dari sumber kedua.⁵⁶ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik:

1. Studi Dokumentasi

Data dikumpulkan dengan merujuk pada sumber-sumber yang tersedia, menggunakan data yang relevan dengan objek penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau dari literatur lain yang relevan dengan penelitian.

⁵⁴ Prof.Dr.H.M. Sidik Priadana MS dan Denok Sunarsih, S.Pd., M.M. Cht., Metode Penelitian Kuantitatif (Tangerang Selatan: Pascal Books,2021),186.

⁵⁵ Prof.Dr.H.M. Sidik Priadana MS dan Denok Sunarsih, S.Pd., M.M. Cht., Metode Penelitian Kuantitatif (Tangerang Selatan: Pascal Books,2021),202.

⁵⁶ Prof.Dr.H.M. Sidik Priadana MS dan Denok Sunarsih, S.Pd., M.M. Cht., Metode Penelitian Kuantitatif (Tangerang Selatan: Pascal Books,2021),189.

Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini akan memperoleh berbagai informasi dari data sekunder yang akan digunakan, termasuk:

- a. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.
- b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Jawa Timur menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.
- c. PDRB Per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.
- d. PDRB Per kapita Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.
- e. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2021.
- f. Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur 2017-2021

D. Analisis Data

Analisis data kuantitatif deskriptif dilakukan untuk mengevaluasi kinerja data historis dengan tujuan untuk membuat kesimpulan.⁵⁷ Dalam penelitian ini, akan digunakan berbagai metode analisis untuk memahami berbagai aspek ekonomi daerah. Pertama, metode analisis LQ akan digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi lokal yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, untuk mengklasifikasikan kondisi pertumbuhan ekonomi, pendekatan wilayah dengan analisis Tipologi Klasen akan diterapkan. Selanjutnya, analisis Index Williamson akan digunakan

⁵⁷ Prof.Dr.H.M. Sidik Priadana MS dan Denok Sunarsih, S.Pd., M.M. Cht., Metode Penelitian Kuantitatif (Tangerang Selatan: Pascal Books,2021),203.

untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah. Akhirnya, untuk mengevaluasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di wilayah Kabupaten Karesidenan Besuki Raya, analisis Korelasi Pearson akan dilakukan.

1. Analisis Location Quotient (LQ)

Metode *Location Quotient* adalah alat analisis yang sering digunakan untuk mengevaluasi kontribusi penambahan suatu sektor ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Melalui metode ini, sektor-sektor ekonomi internal yang memiliki potensi diidentifikasi dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu basis dan non-basis. Analisis ini membantu merumuskan pergeseran sektor basis berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan nilai wilayah. Berikut Formula perhitungan LQ yang dikemukakan oleh Bendavid-Val (dalam Tarigan, 2007) :

$$LQ = \frac{X_r/R_r}{X_n/R_n}$$

Keterangan :

X_r : Nilai PDRB sektor i pada kabupaten/kota

X_n : Nilai PDRB sektor i Provinsi Jawa Timur

R_r : Total PDRB kabupaten/kota

R_n : Total PDRB Provinsi Jawa Timur

Hasil perhitungan LQ menyimpulkan dua bagian yaitu :

- Sektor basis atau spesialisasi wilayah jika nilai $LQ > 1$
- Sektor non basis jika $LQ < 1$

- Jika LQ bernilai satu maka tingkat spesialisasi di kabupaten sama dengan tingkat Provinsi.

2. Index Williamson

Terdapat beragam metode untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, salah satunya adalah melalui Indeks Williamson. Indeks ini merupakan sebuah indikator yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeffrey G Williamson pada tahun 1996 untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah. Dalam perhitungannya, Indeks Williamson menggunakan data dasar berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk. Adapun Indeks Williamson secara statistik dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y}$$

dimana:

V_w : indeks williamson

Y_i : PDRB perkapita di kabupaten dan kota

y : PDRB perkapita rata-rata kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur

f_i : jumlah penduduk di kabupaten dan kota i

n : jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur

Indeks Williamson memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, di mana nilai positif menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin besar ketimpangan pendapatan antar wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah nilai

indeksnya, semakin kecil tingkat ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut. Tingkat ketidakmerataan yang signifikan terjadi ketika nilai indeks melebihi 0,50. Sementara itu, ketidakmerataan dianggap rendah jika nilai indeksnya berada di bawah 0,50.

3. Korelasi Pearson

Korelasi Pearson merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Dua variabel dianggap berkorelasi jika perubahan pada satu variabel akan diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya, dengan arah yang sama atau berlawanan. Ketika nilai korelasi positif, itu menandakan adanya hubungan searah antara kedua variabel, sedangkan nilai korelasi negatif menunjukkan hubungan berlawanan. Namun, nilai koefisien korelasi yang rendah tidak menunjukkan bahwa kedua variabel tidak memiliki hubungan. Selain itu, hubungan linier yang kuat antara dua variabel tidak selalu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas. Untuk mengetahui arah hubungan antara pertumbuhan ekonomi di Kabupaten wilayah Karesidenan Besuki Raya dan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten wilayah tersebut, analisis Korelasi Pearson dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews9.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Karesidenan Besuki

Karesidenan Besuki Raya adalah kawasan yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini mencakup empat kabupaten dan kota, yaitu Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso.

a. Kabupaten Jember

Kabupaten Jember terletak di antara garis lintang 113015'47'' hingga 114002'35'' Bujur Timur dan garis lintang 7058'06'' hingga 80'33'44'' Selatan, merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, sekitar +200km ke arah timur dari Surabaya.⁵⁸ Luas wilayahnya adalah 3.306,689 km² dengan 31 kecamatan dan 248 desa/kelurahan. Mayoritas lahan di Kabupaten Jember merupakan kawasan hijau, meliputi hutan, sawah, tegalan, dan perkebunan.⁵⁹ Batas wilayahnya di sebelah utara adalah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.⁶⁰

⁵⁸ Sephanus Pratomo Septiyardi Putranto S.ST dkk., *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024* (Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2024), 5.

⁵⁹ Sephanus Pratomo Septiyardi Putranto S.ST dkk., *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024* (Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2024), 5.

⁶⁰ Sephanus Pratomo Septiyardi Putranto S.ST dkk., *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024* (Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2024), 6.

b. Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang sekitar 175,8 km dan terdiri dari 10 pulau.⁶¹ erbagi menjadi 25 kecamatan dan 217 desa/kelurahan, wilayah ini memiliki topografi dataran tinggi yang didominasi oleh pegunungan yang menghasilkan banyak produksi perkebunan.⁶² Secara astronomis, Kabupaten Banyuwangi terletak di antara garis lintang 7043'-8046' LS dan garis bujur 113053'-114038'BT, dengan luas wilayah sekitar 5.782,50 km², menjadikannya Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur.⁶³ Geografisnya menempatkannya di ujung timur Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudera Hindia di selatan, dan Kabupaten Bondowoso serta Kabupaten Jember di barat.

c. Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah sekitar 1.560,096 km², yang setara dengan sekitar 3,26 persen dari total luas Provinsi Jawa Timur.⁶⁴ erletak di dataran tinggi, secara astronomis berada pada lintang 7050'10" hingga 7056'414" LU dan bujur 113048'10" hingga 113048'26" BT. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten

⁶¹ Faizah Nur Fatimah, A,Md. S. Stat., *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2024* (Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwaangi, 2024),7.

⁶² Faizah Nur Fatimah, A,Md. S. Stat., *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2024* (Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwaangi, 2024),7.

⁶³ Faizah Nur Fatimah, A,Md. S. Stat., *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2024* (Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwaangi, 2024),5.

⁶⁴ Syaiful Nugroho Adi Saputro, S.ST., *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2024* (Bondowoso: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024),5.

Situbondo, Jember, dan Banyuwangi.⁶⁵ Terdiri dari 23 kecamatan, 209 desa, dan 10 kelurahan, wilayah administratifnya merupakan wilayah terkunci daratan yang tidak langsung berbatasan dengan laut. Oleh karena itu, lebih dari 50% wilayah Kabupaten Bondowoso didominasi oleh daerah pegunungan, perbukitan, dan dataran tinggi.⁶⁶

d. Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo memiliki luas wilayah sekitar 1.638,50 km² atau setara dengan 163.850 hektar, dengan bentuk yang memanjang dari barat ke timur sekitar 140 km.⁶⁷ Terletak di ujung timur Pulau Jawa bagian Utara, kabupaten ini berada pada lintang antara 7035'-7044' LS dan bujur 113030'-114042 BT.⁶⁸ Di sebelah utara, Kabupaten Situbondo berbatasan langsung dengan Selat Madura, di sebelah timur dengan Selat Bali, di sebelah selatan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, serta di sebelah barat dengan Kabupaten Probolinggo.⁶⁹

2. Kondisi Perekonomian

Keadaan Perekonomian di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya dalam kurun waktu lima tahun dari 2017-2021 mengalami

⁶⁵ Syaiful Nugroho Adi Saputro, S.ST., *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2024* (Bondowoso: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024),7.

⁶⁶ Syaiful Nugroho Adi Saputro, S.ST., *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2024* (Bondowoso: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024),7.

⁶⁷ Bagus Susilo, S.ST, M.Si., *Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021* (Situbondo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo,2021), 4.

⁶⁸ Bagus Susilo, S.ST, M.Si., *Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021* (Situbondo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo,2021), 3.

⁶⁹ Bagus Susilo, S.ST, M.Si., *Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021* (Situbondo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo,2021), 3.

peningkatan. Kondisi perekonomian kabupaten dapat dilihat dari PDRB setiap tahunnya.

a. Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PDRB yang di hasilkan pada setiap tahunnya.

Tabel 4.1
PDRB Kabupaten Jember Tahun 2017-2021

No	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)
1	2017	48912959,78
2	2018	51370517,20
3	2019	54200041,26
4	2020	52586557,70
5	2021	54688719,13

Sumber : BPS Kabupaten Jember

Pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Jember pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2020 yang mana PDRB Kabupaten Jember menurun akibat maraknya wabah covid-19.

b. Kabupaten Banyuwangi

Sementara itu yang terjadi pada Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PDRB yang di hasilkan pada setiap tahunnya yang mengalami naik turun pendapatan PDRB.

Tabel 4.2
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021

No	Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)
1	2017	57 932,55
2	2018	52 367,70
3	2019	55 274,03
4	2020	53 295,11
5	2021	55 472,57

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi

Dapat dilihat dari penyajian tabel 4.2 PDRB di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dan penurunan secara bergantian pada setiap tahunnya. PDRB tertinggi dihasilkan yaitu pada tahun 2017 sebesar 57 932,55 dalam miliar rupiah.

c. Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PDRB yang di hasilkan pada setiap tahunnya.

Tabel 4.3
PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021

No	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)
1	2017	12325664.92
2	2018	12951515.29
3	2019	13637364.77
4	2020	13451770.54
5	2021	13921654.24

Pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Bondowoso pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2020 yang mana PDRB Kabupaten Bondowoso menurun akibat maraknya wabah covid-19.

d. Kabupaten Situbondo

Kabupaten Bondowoso dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PDRB yang di hasilkan pada setiap tahunnya.

Tabel 4.4
PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

No	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)
1	2017	12230459.30
2	2018	12897924.58
3	2019	13599572.27
4	2020	13282836.89
5	2021	13715834.17

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

Pada tabel 4.4 diatas menunjukan bahwa PDRB Kabupaten Situbondo pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2020 yang mana PDRB Kabupaten Situbondo menurun akibat maraknya wabah covid-19.

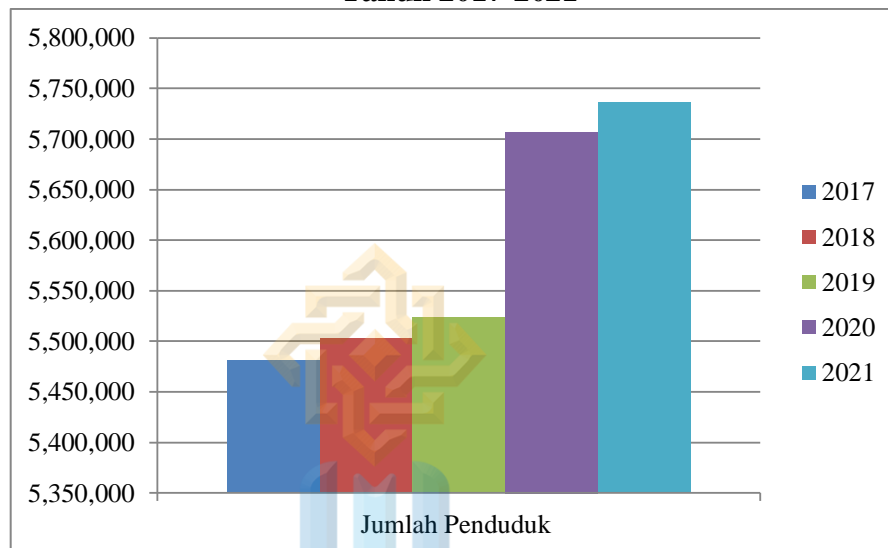
B. Penyajian data

1. Jumlah Penduduk wilayah Karesidenan Besuki Raya

Jumlah penduduk merujuk pada semua individu yang tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama minimal enam bulan, atau mereka yang tinggal kurang dari enam bulan tetapi bermaksud menetap.

Jumlah penduduk di seluruh wilayah Karesidenan Besuki Raya merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi karena penduduk merupakan sumber daya yang signifikan.

Gambar 4.1
Jumlah Penduduk Wilayah Karesidenan Besuki Raya
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah.

Jika dilihat dari kepadatan penduduknya, di tahun 2021 kepadatan penduduk Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki Raya mencapai 5.735.684 jiwa penduduk. Kabupaten Jember menjadi Kabupaten terbanyak jumlah penduduknya dibandingkan Kabupaten lainnya di Wilayah Karesidenan Besuki Raya dengan rata-rata 2 juta jiwa penduduk.

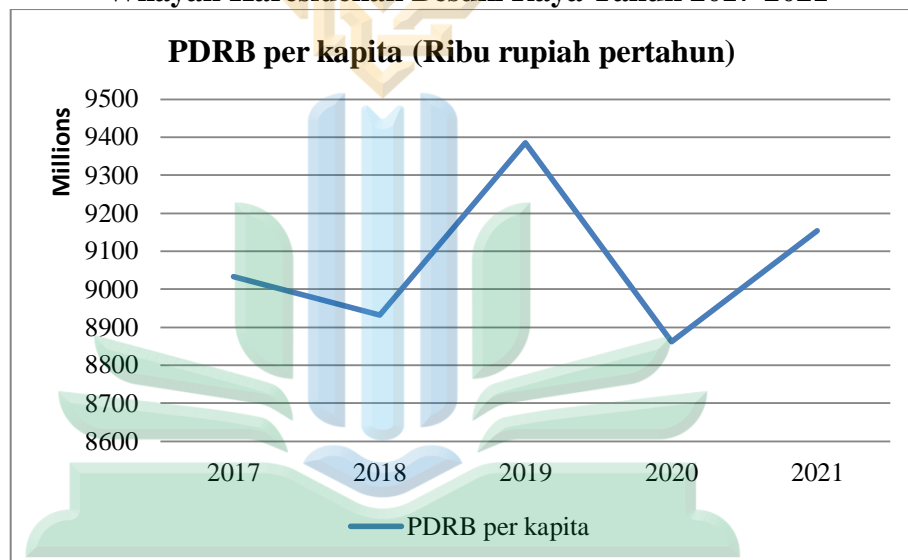
Sementara itu berbanding terbalik dengan Kabupaten Situbondo yang menjadi Kabupaten yang paling rendah jumlah penduduknya diantara Kabupaten lainnya di wilayah Karesidenan Besuki Raya. Penduduk yang berkualitas baik dapat menjadi aset dan potensi besar dalam pembangunan suatu daerah.

2. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk dan pencapaian pembangunan suatu wilayah.

Biasanya, pendapatan per kapita dinilai berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, baik dengan menggunakan harga konstan maupun harga berlaku. Pada gambar 4.2 ditunjukkan perkembangan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di wilayah Karesidenan Besuki.

Gambar 4.2
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah penulis

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, PDRB per kapita di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya menunjukkan adanya naik turun dalam setiap tahunnya. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2020 dimana pada saat itu di negara Indonesia sedang terjadi wabah penyakit dan sempat menutup akses dalam hal pekerjaan maupun kegiatan ekonomi.

Selain menggunakan pendapatan per kapita sebagai indikator, kinerja pelaksanaan pembangunan ekonomi juga dievaluasi melalui

pencapaian pembangunan, yang mencakup laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor-sektor usaha terhadap pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), atau Gross National Product (GNP) dari tahun ke tahun. PDRB dapat disusun menggunakan tiga pendekatan: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan harga berlaku atau konstan. PDRB berlaku, juga dikenal sebagai PDRB nominal, disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan untuk menganalisis struktur perekonomian. Di sisi lain, PDRB atas dasar harga konstan disusun dengan menggunakan harga pada tahun dasar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun seri 2010.

Tabel 4.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Jember	4,63	4,57	5,03	-6,08	3,28
Kabupaten Banyuwangi	5,11	5,52	5,25	-8,72	3,27
Kabupaten Bondowoso	4,51	4,62	4,79	-1,3	3,1
Kabupaten Situbondo	4,53	4,95	4,93	-2,62	2,81
Karesidenan Besuki Raya	4,695	4,915	5	-4,68	3,115
Provinsi Jawa Timur	4,8	4,92	4,88	-4,40	2,86

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah penulis

Untuk mengetahui kontribusi sektor-sektor terhadap nilai total PDRB, dilakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) berdasarkan lapangan usaha. Secara mendasar, kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB suatu daerah mencerminkan struktur perekonomian dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Melalui PDRB lapangan usaha, dapat terlihat sektor-sektor mana yang memiliki peran tinggi atau rendah dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Namun, penurunan kontribusi suatu sektor dari tahun ke tahun tidak selalu berarti penurunan PDRB sektor tersebut, tetapi mungkin disebabkan oleh pertumbuhan sektor-sektor lain yang lebih cepat. Kontribusi sektor-sektor terhadap pembentukan total nilai PDRB Provinsi Jawa Timur ditunjukkan pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.29	10.48	10.06	10.40	10.22
Pertambangan dan Penggalian	5.44	5.28	5.08	5.02	4.63
Industri Pengolahan	29.29	29.86	30.23	30.31	30.26
Pengadaan Listrik dan Gas	0.31	0.29	0.28	0.28	0.28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
Konstruksi	9.18	9.28	9.32	9.23	9.13
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.43	18.56	18.63	17.98	18.71
Transportasi dan Pergudangan	2.96	2.99	2.94	2.70	2.67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.34	5.45	5.56	5.18	5.16
Informasi dan	5.71	5.78	5.88	6.62	6.83

Komunikasi					
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.57	2.55	2.51	2.57	2.52
Real Estate	1.70	1.72	1.72	1.83	1.81
Jasa Perusahaan	0.77	0.79	0.80	0.76	0.75
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.18	2.16	2.12	2.16	2.09
Jasa Pendidikan	2.63	2.62	2.67	2.84	2.77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.66	0.67	0.68	0.76	0.77
Jasa Lainnya	1.43	1.42	1.43	1.27	1.29
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Industri pengolahan menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur, mencapai 29,29 persen pada tahun 2017 dan 30,26 persen pada tahun 2021. Dalam rentang waktu 2017-2021, rata-rata kontribusi sektor ini adalah 29,99 persen. Diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yang berada di peringkat kedua dengan kontribusi terbesar, mencapai 18,43 persen pada tahun 2017 dan 18,71 persen pada tahun 2021, dengan rata-rata kontribusi sebesar 18,46 persen dalam periode yang sama. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati posisi ketiga dalam pembentukan nilai total PDRB Provinsi Jawa Timur, dengan kontribusi sebesar 11,29 persen pada tahun 2017 dan 10,22 persen pada tahun 2021, atau rata-rata 10,49 persen dari tahun 2017 hingga 2021. Di sisi lain, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang merupakan sektor dengan kontribusi terendah terhadap pembentukan nilai total PDRB Provinsi Jawa Timur,

yaitu 0,10 persen pada tahun 2017 dan 0,11 persen pada tahun 2021, atau rata-rata 0,102 persen dari tahun 2017 hingga 2021.

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Hasil Analisis sektor ekonomi daerah menggunakan metode analisis

Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi potensi sektor ekonomi suatu daerah dengan membandingkan nilai sektor di daerah tersebut dengan nilai sektor di tingkat lebih tinggi.⁷⁰ Ketika nilai LQ suatu sektor > 1 , maka sektor tersebut dianggap sebagai sektor basis, sementara jika nilai LQ < 1 , sektor tersebut dianggap sebagai sektor non-basis dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.⁷¹ Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika nilai sektor LQ < 1 jumlahnya sama maka H_1 ditolak, H_0 diterima artinya tidak ada perbedaan sektor potensi di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya
- b. Jika nilai sektor LQ > 1 jumlahnya berbeda maka H_1 diterima, H_0 ditolak artinya terdapat perbedaan sektor potensi di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya

⁷⁰ Putri Ramadhani Utami, "Analisis Potensi Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018),32.

⁷¹ Putri Ramadhani Utami, "Analisis Potensi Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018),32.

Pada penelitian ini, Analisis *Location Quotient* dilakukan di empat kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki Jawa Timur. Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai sektor ekonomi di setiap kabupaten dengan nilai sektor ekonomi di tingkat provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur. Berikut pada Tabel 4.7 ditunjukkan sektor-sektor basis kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki Raya tahun 2017-2021 berdasarkan analisis *Location Quotient*.

Tabel 4.7
Sektor-sektor basis Kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki Raya Tahun 2017-2021 Berdasarkan Analisis *Location Quotient* (LQ)

Kabupaten	Sektor-sektor (S)
Kabupaten Jember	1, 10, 14, 15, 16
Kabupaten Banyuwangi	1
Kabupaten Bondowoso	1, 10, 11, 14, 15, 16, 17
Kabupaten Situbondo	1

Sumber: diolah penulis (ada pada lampiran 1)

Keterangan :

- a) S1 = Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- b) S2 = Pertambangan dan Penggalian
- c) S3 = Industri Pengolahan
- d) S4 = Pengadaan Listrik dan Gas
- e) S5 = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang
- f) S6 = Kontruksi
- g) S7 = Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- h) S8 = Trasportasi dan Pergudangan
- i) S9 = Penyediaan Akoodasi dan Makan dan Minum

- j) S10 = Informasi dan Komunikasi
- k) S11 = Jasa Keuangan dan Asuransi
- l) S12 = Real estate
- m) S13 = Jasa Perusahaan
- n) S14 = Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
- o) S15 = Jasa Pendidikan
- p) S16 = Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- q) S17 = Jasa Lainnya

Berdasarkan hasil analisis *location quotient* di Kabupaten Wilayah Besuki Raya Provinsi Jawa Timur pada tabel 4.7 Menunjukkan bahwa jumlah sektor yang bernilai $LQ > 1$ itu berjumlah berbeda, maka H_0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sektor potensi di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya.

2. Hasil analisis ketimpangan pendapatan antar kabupaten (Index Williamson)

Index Williamson merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk melihat besarnya ketimpangan pendapatan antar daerah.⁷² Dasar pengambilan keputusan analisis Index Williamson sebagai berikut :

- a. Jika nilai Index Williamson = 0 maka H_1 ditolak, H_0 diterima yang artinya tidak terdapat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya

⁷² Sandre Surmana Sembiring, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara" (Skripsi, Universitas Jember, 2020),16.

- b. Jika nilai Index Williamson $> 0,1$ maka H1 diterima, H0 ditolak artinya terdapat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya

Berikut pada tabel 4.8 menunjukkan hasil perhitungan Index Williamson antar Kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki Raya tahun 2017-2021.

Tabel 4.8
Index Williamson antar Kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki Raya tahun 2017-2021

Tahun	Indeks Williamson
2017	0,133022927
2018	0,135410981
2019	0,136148384
2020	0,120843141
2021	0,121614674
Rata-rata	0,129408021

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan hasil analisis Index Williamson pada tabel 4.8 Menunjukkan bahwa nilai Index Williamson di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya bernilai rata-rata lebih daripada 0 yakni $0,129408021 > 0$. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi ketimpangan yang rendah di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya. tahun 2019 menjadi tahun terbesar dalam nilai perhitungan Index Williamson dengan nilai $0,136148384$ yang berarti pada tahun 2019 tingkat ketimpangan lebih besar dengan tahun sebelumnya. Sedangkan nilai Index Williamson terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar $0,120843141$. Sementara nilai rata-rata Index Williamson pada tahun 2017 sampai 2021 sebesar $0,129408021$ yang berarti nilai tersebut hampir

mendekati angka nol, dimana jika nilai perhitungan Index Williamson Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki pada tahun 2017 sampai 2021 mendekati angka nol berarti ketimpangan pendapatan tergolong rendah atau kecil.

3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten (Korelasi Pearson)

Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut..⁷³

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika nilai Korelasi Pearson < 0 maka H1 ditolak, H0 diterima yang artinya tidak terjadi hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wilayah Besuki Raya.
- b. Jika nilai Korelasi Pearson > 0 maka H1 diterima, H0 ditolak yang artinya terjadi hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wilayah Besuki Raya.

Jika nilai r mendekati 0, menandakan hubungan antara dua variabel menjadi lemah, sedangkan jika mendekati 1, menunjukkan hubungan yang kuat antara keduanya.⁷⁴ Analisis Korelasi Pearson digunakan untuk

⁷³ Putri Ramadhani Utami, "Analisis Potensi Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018),36.

⁷⁴ Baiq Wihan Sirtama, " Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemuktian Hipotesis Kuznets)," *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang* Vol 5, No.4 (2021),658.

melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Dengan menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi dengan nilai Index Williamson. Hasil perhitungan Korelasi Pearson di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Analisis Korelasi Pearson Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ketimpangan Tahun 2017-2021

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 04/14/24 Time: 11:11

Sample: 2017 2021

Included observations: 5

Correlation		X	Y
Probability			
X		1.000000	
Y		0.772440	1.000000
		0.1258	

data diolah penulis menggunakan Eviews9

Hasil Korelasi Pearson pada tabel 4.9 Menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif namun kurang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya yaitu dengan nilai $0,1258 > 0$ Dengan demikian, maka H_1 diterima yang artinya terdapat hubungan yang positif namun lemah antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya.

D. Pembahasan

1. Sektor ekonomi daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menggunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ) Sektor Basis di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya

Berdasarkan analisis *Location Quotient*, perbedaan terlihat dalam sektor-sektor basis potensial di empat kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki Raya dari tahun 2017 hingga 2021. Data dalam Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sektor-sektor dengan $LQ > 1$ bervariasi di antara empat kabupaten.

Kabupaten Bondowoso menonjol sebagai kabupaten dengan jumlah sektor basis terbanyak yang berkontribusi pada peningkatan total nilai Produk Domestik Regional Bruto, dengan total tujuh sektor basis. Sektor basis dalam analisis *Location Quotient* merujuk pada sektor dengan nilai $LQ > 1$. Di Kabupaten Bondowoso, tujuh sektor memiliki nilai $LQ > 1$, termasuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, dan sektor jasa lainnya. Di sisi lain, Kabupaten Jember memiliki lima sektor dengan nilai $LQ > 1$, termasuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor informasi dan komunikasi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa pendidikan dan sektor jasa kesehatan serta kegiatan sosial. Sementara itu, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten

Situbondo masing-masing memiliki satu sektor unggulan dengan nilai $LQ > 1$, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan demikian, hasil hipotesis pertama, yaitu H_1 diterima sementara H_0 ditolak, menunjukkan adanya perbedaan dalam sektor-sektor basis yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Putri tahun 2018 yang berjudul “Analisis potensi ekonomi daerah dan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Banten” menyatakan bahwa terdapat perbedaan sektor potensi ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.⁷⁵

2. Analisis Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki Raya (Indeks Williamson)

Hasil analisis Indeks Williamson menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antara Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki Raya dari tahun 2017 hingga 2021. Data dalam Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata Indeks Williamson selama periode tersebut adalah 0,129408021. Nilai ini berada di atas nol namun lebih rendah dari 0,5, menandakan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan yang dikategorikan rendah. Dengan demikian, hasil hipotesis kedua, yaitu H_2 diterima sementara H_0 ditolak, menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang rendah di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya.

⁷⁵ Putri Ramadhani Utami, “Analisis Potensi Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Hal ini sejalan dengan teori Jeffrey G Williamson yang menyatakan bahwa adanya ketimpangan pendapat jika nilai Indeks $0 < IW < 1$, yang artinya terdapat ketimpangan jika nilai Indeks tidak sama dengan nol. Jika mendekati nol maka dikatakan ketimpangan yang rendah, sedangkan jika mendekati angka 1 maka dikatakan ketimpangan yang tinggi.

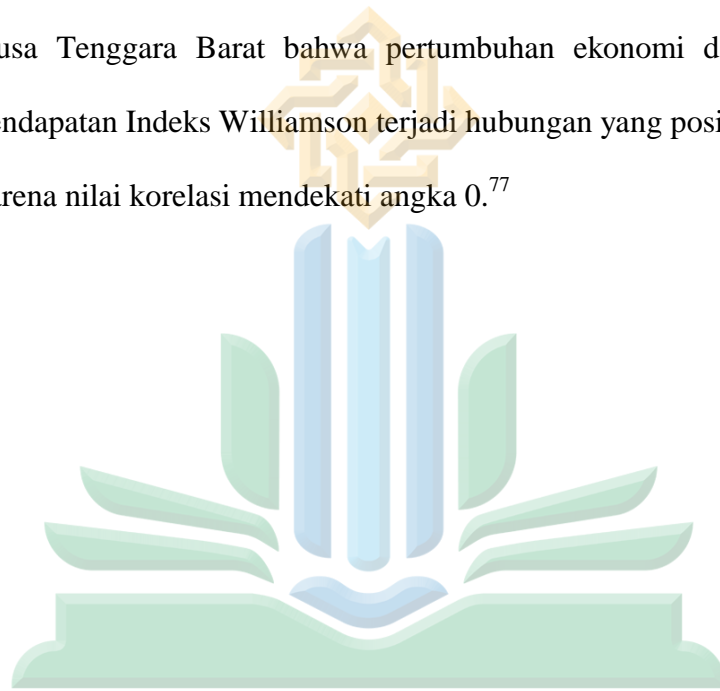
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Meliza dan Murtala pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh” bahwa terjadi ketimpangan pendapatan tinggi di Provinsi Aceh.⁷⁶

3. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya (Korelasi Pearson)

Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di wilayah Karesidenan Besuki Raya dari tahun 2017 hingga 2021. Hal ini terlihat dalam Tabel 4.9 dengan nilai korelasi sebesar 0,1258, yang menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan positif tetapi lemah. Dengan demikian, hasil hipotesis ketiga, yaitu H_3 diterima sementara H_0 ditolak, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan positif namun lemah.

⁷⁶ Meliza Murtala, “Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Aceh,” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* Vol 3, no.1 (2020): 28-38.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Baiq Wihan Sirtama pada tahun 2021 yang berjudul “ Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di provinsi Nusa Tenggara Barat (pembuktian hipotesis Kuznets)” bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan Indeks Williamson di Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan Indeks Williamson terjadi hubungan yang positif namun lemah karena nilai korelasi mendekati angka 0.⁷⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁷ Baiq Wihan Sirtama, “ Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemuktian Hipotesis Kuznets),” *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang* Vol 5, No.4 (2021),658.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai Analisis Potensi Sektor Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Wilayah Besuki Raya Tahun 2017-2021, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sektor ekonomi daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten wilayah Karesidenan Besuki Raya Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan adanya perbedaan sektor basis ekonomi daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya selama Tahun 2017-2021. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten wilayah Karesidenan Besuki Raya, kemudian disusul oleh sektor informasi dan komunikasi dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial.
2. Terjadi ketimpangan pendapatan di kabupaten wilayah Karesidenan Besuki pada periode 2017-2021 dengan nilai rata-rata ketimpangan pendapatan sebesar 0,1294 dengan dikategorikan ketimpangan yang rendah.
3. Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya pada periode 2017-2021 memiliki nilai sebesar 0,1258, yang menunjukkan adanya hubungan positif namun lemah.

B. Saran-saran

Diharapkan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas pada sektor-sektor basis yang memiliki kapasitas untuk menjaga perekonomian wilayah, dengan mengupayakan fasilitasi atau perbaikan terhadap faktor-faktor pendukung yang memengaruhi sektor-sektor yang memiliki potensi tersebut.

Pemerintah lebih mengutamakan sektor yang mampu membantu perekonomian wilayah seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, dan jasa pendidikan. Karena jika suatu daerah memiliki SDM yang berkualitas bukan tidak mungkin daerah tersebut akan bisa meminimalisir masalah pada daerah tersebut.

Bagi peneliti lainnya, diharapkan untuk meneliti potensi sektor ekonomi sebaiknya menggunakan analisis yang lainnya seperti nilai surplus pendapatan, analisis shift share dan tipologi klassen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Fitri., Roeskani Sinaga, Asyari, Rahmah Farahdita Soeyatno, Dikson Silitonga, Akhmad Solikin, Aulia Keiko Hubbansyah, Robert Tua Siregar, Dessy Maulina, Ria Kusumaningrum, Nur Fitriyani Sahamony, Erdah Litriani, Nurjanna Ladjin. “*Ekonomi Pembangunan.*” Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Andiny, Puti, Nursani Adelida, Rahmi Meutia. “ Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota (Studi Kasus Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa),” *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol 3, no.1 (2019).
- Annisa, Nur. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Asmara, Kiky, Sephen Dwi Aura Jagad Setya Dewinta. “ Pengaruh Sektor-sektor Potensial Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol10, no.2 (2022)
- Banendro, Sigit Dwiwahju. , “*Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012,*” Tesis, Universitas Jember, 2016.
- BPS (2010). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.* BPS Kabupaten Jember.
- BPS (2010). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.* BPS Kabupaten Banyuwangi.
- BPS (2010). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.* BPS Kabupaten Bondowoso.
- BPS (2010). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.* BPS Kabupaten Situbondo
- BPS (2010). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.* BPS Provinsi Jawa Timur.
- BPS (2010). *PDRB Menurut Lapangan Usaha (17 Sektor) Triwulanan 2017-2021.* BPS Provinsi Jawa Timur.

- BPS(2010). *Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota*. BPS Provinsi Jawa Timur.
- BPS(2010). *Distribusi Persentase Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi*. BPS RI.
- BPS(2010). *Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota*. BPS Provinsi Jawa Timur.
- BPS(2010). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota*. BPS Provinsi Jawa Timur.
- Darmayanto, Hendrikus. “ *Analisis Ketimpangan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020*,” Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022.
- Fatimah, Nur Faizah, A.Md., Stat. “*Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka (Banyuwangi Regency In Figures) 2024*.” Banyuwangi : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2024.
- Ismail, Nurdin, dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Jannah, Miftahul Hairatul. “*Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020*,” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Logaritma, Sandra. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Jakarta: BPS RI, 2020..
- Manik, Merdita. “Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol 23, no.2 (2022).
- Masrohatin, Siti, Hikmatul Hasanah, Vira Rahmadiyahanti. “Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Lokal Sektor Kerajinan Monte Dengan Model Triple Helix Di Blimbingsari Banyuwangi.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3, no.2 (2023).
- Masrohatin, Siti, Rini Puji Astuti. “Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur.” *Journal on Education*, Vol 5, no.4 (2023).

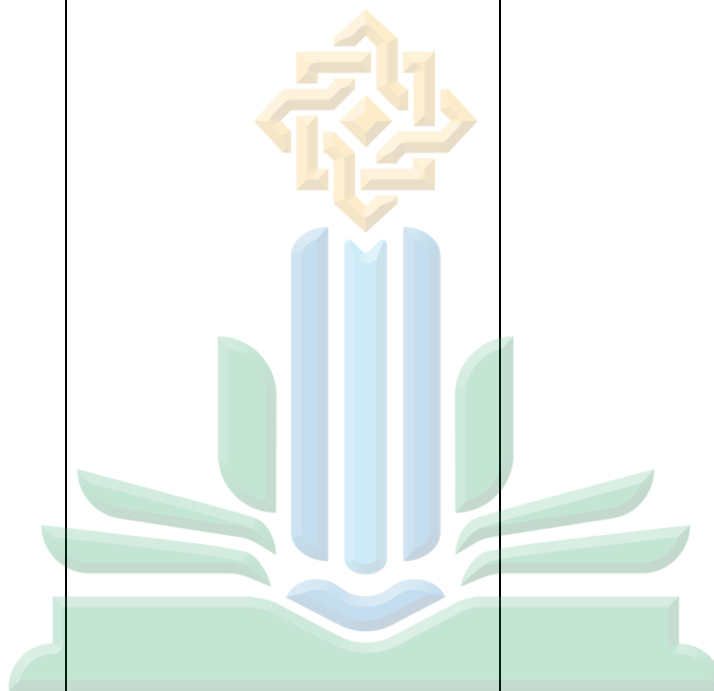
- Masruroh, Nikmah, Agung Parmono.” Menggali Potensi Desa Berbasis Kerakrayan; Studi Desa Rowotengah, Sumberbari Jember Indonesia.” *Jurnal Fenomena*, Vol 17, no.2 (2018).
- Masruroh, Nikmah, Suprianik. “ Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif.” *Global Education Journal*, Vol 1, no. 2 (2023).
- Masruroh, Nikmah, Suprianik.” Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Mawashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, Vol 13, no.2 (2023).
- Muljanto, Muhammad Agus. “Analisis Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, Vol 5, no,2 (2021).
- Murtala, Meliza. “Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Aceh,” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Vol 3, no.1 (2020).
- Pratiwi, Atifah Esti. , “*Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pendapatan Regional Antar Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019*,” Skripsi, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2021.
- Purwanti, Putu Ayu Paramitha, Ni Putu Wiwin Setyari. “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Kawasan Strategis SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan),” *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol 18, no.2 (2021).
- Putranto, Stephanus Pratomo Septyardii S.ST, Dian Anggraeni Rahayuningtyas, S.ST, Arumita Hertriesa, A.Md, Indrianto Kukuh Darmawan, S.E, Ahmad Iswardi, S.E. “*Kabupaten Jember Dalam Angka (Jember Regency In Figures) 2024*.” Jember : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2024.
- Rosyidah, Shinta Iffah. “Analisis Potensi Sektor Ekonomi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Ekonomi*, Vol 27, no.3 (2022)
- Saputro, Syaiful Nugroho Adi, S.ST. “*Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (Bondowoso Regency In Figures) 2024*.” Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024.
- Sembiring, Sandre Surmana. “*Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*,” Skripsi, Universitas Jember, 2020.

- Sirtama, Baiq Wihan “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pembuktian Hipotesis Kuznets),” *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, Vol 5, no.4(2021).
- Sitindaon, Daniel. “ *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Demak,*” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Sunarsi, Denok S.Pd., M.M., CHt, dan Prof. Dr. H.M. Sidik Priadana, M.S. “*Metode Penelitian Kuantitatif.*” Tanggerang Selatan : Pascal Books,2021.
- Suryani, Susie, Nawarti Bustamam. “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau,” *Jurnal Ekonomi Kiat*, Vol 32, no.2 (2021).
- Syahri, Dinda, Yesy Gustiara. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Utara Periode 2015-2019,” *Independent: Journal of Trends Economics and Accounting Research*, Vol 1, no. 1 (2020).
- Utami, Putri Ramdhani. “*Analisis Potensi Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2011-2015,*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Wijaya, Intan Andriyani, Marseto. “Analisis Potensi Sektor Ekonomi (location quotient, shift share, dan tipology klassen,” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol 19, no.1 (2022).
- Yulianti, Agissa Melatica. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2019,*” Skripsi, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2022.

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah	Hipotesis
Analisis Potensi Sektor Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Wilayah Besuki Raya Tahun 2017-2021	Variabel Dependen : Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Variabel Independen : Pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan pendapatan (Y) : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan, Pendapatan PDRB perkapita 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 3. Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha 4. Jumlah Proporsi Penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Studi Dokumentasi b. Badan Pusat Statistik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian : Penelitian Kuantitatif 2. Metode Analisis Data : <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis Location Quotient (LQ) b. Indeks Williamson c. Korelasi Pearson 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja sektor ekonomi daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki? 2. Apakah terjadi ketimpangan pendapatan yang antar Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki? Seberapa besar ketimpangannya? 3. Bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H_0: Tidak terdapat perbedaan sektor ekonomi daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wilayah Karesidenan Besuki Raya. H_1: Terdapat perbedaan sektor ekonomi daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

			 <p data-bbox="651 1046 1588 1278">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R</p>		<p data-bbox="1641 309 1868 523">ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki?</p>	<p data-bbox="1951 309 2119 416">Wilayah Karesidenan Besuki Raya.</p> <p data-bbox="1906 424 2119 1082">2. H_0: Tidak terdapat ketimpangan pendapatan yang antar Kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki Raya. H_2: Terdapat ketimpangan pendapatan yang antar Kabupaten di Wilayah Besuki Raya.</p> <p data-bbox="1906 1090 2119 1337">3. H_0: Tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan</p>
--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pendapatan
antar
Kabupaten
di Wilayah
Karesidenan
Besuki Raya
H₃: Terdapat
hubungan
antara
pertumbuhan
ekonomi dan
ketimpangan
pendapatan
antar
kabupaten di
Wilayah
Karesidenan
Besuki
Raya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ridwan Firmansyah

Nim : 204105020086

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapa pun.

J E M B E R

Jember, 15 Mei 2024



B. DATA PENELITIAN

1. Data Pertumbuhan Ekonomi

a. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Periode 2015-2019

SISTEM NERACA REGIONAL

Tabel 13.2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (miliar rupiah), 2015–2019
Gross Regional Domestic Product at Constant 2010 Prices by Regency/Municipality in Jawa Timur Pro (billion rupiahs), 2015–2019

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2015	2016	2017	2018 ^a	2019 ^a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Pacitan	9 019,54	9 489,69	9 962,51	10 511,44	11 045,07
Ponorogo	11 687,87	12 305,65	12 933,45	13 619,57	14 301,79
Trenggalek	10 501,58	11 026,55	11 579,86	12 161,86	12 779,46
Tulungagung	22 326,63	23 446,44	24 637,37	25 920,20	27 299,80
Blitar	20 928,47	21 991,43	23 107,48	24 286,24	25 530,11
Kediri	24 007,72	25 211,90	26 446,17	27 789,50	29 197,65
Malang	55 317,82	58 247,35	61 408,93	64 823,28	68 386,88
Lumajang	18 676,95	19 555,17	20 542,93	21 574,22	22 603,33
Jember	44 222,56	46 533,56	48 912,96	51 472,98	54 204,14
Banyuwangi	44 529,93	46 924,58	49 480,44	52 370,57	55 278,81
Bondowoso	11 179,62	11 735,59	12 325,67	12 954,64	13 640,46
Situbondo	11 086,48	11 640,76	12 230,46	12 898,93	13 601,49
Probolinggo	19 570,99	20 504,09	21 418,25	22 375,24	23 396,41
Pasuruan	84 415,72	89 011,18	94 101,98	99 547,38	105 351,07
Sidoarjo	112 012,86	118 179,19	125 039,06	132 571,19	140 511,23
Mojokerto	46 792,33	49 360,59	52 187,82	55 258,90	58 470,69
Jombang	22 960,25	24 199,07	25 497,00	26 883,23	28 244,61
Nganjuk	14 875,35	15 661,81	16 485,62	17 374,16	18 305,79
Madiun	10 704,87	11 268,90	11 879,34	12 485,01	13 161,84
Magetan	10 823,92	11 398,13	11 978,06	12 603,12	13 238,38
Ngawi	11 223,12	11 807,56	12 406,44	13 052,89	13 711,91
Bojonegoro	46 892,81	57 187,37	63 046,47	65 817,53	69 987,99
Tuban	37 256,03	39 081,76	41 027,71	43 147,58	45 366,13
Lamongan	22 316,88	23 623,79	24 922,95	26 280,92	27 709,46
Gresik	81 380,44	85 850,11	90 855,60	96 275,98	101 485,30
Bangkalan	16 906,84	17 018,65	17 618,60	18 362,02	18 551,82
Sampang	11 874,48	12 606,81	13 198,46	13 800,02	13 995,81
Pamekasan	9 316,86	9 815,77	10 310,24	10 873,49	11 408,44
Sumenep	21 750,58	22 311,69	22 949,70	23 783,32	23 816,44
Kota/Municipality					
Kediri	72 945,53	76 988,37	80 946,16	85 341,23	90 008,68
Blitar	3 856,91	4 079,26	4 315,02	4 566,47	4 833,36
Malang	41 952,13	44 303,90	46 824,75	49 502,48	52 341,30
Probolinggo	6 628,76	7 018,29	7 430,62	7 871,82	8 339,54
Pasuruan	4 813,31	5 076,35	5 354,09	5 650,86	5 965,30
Mojokerto	3 991,37	4 221,83	4 460,45	4 719,23	4 990,68
Madiun	8 455,44	8 954,70	9 486,14	10 051,71	10 623,81
Surabaya	324 215,17	343 652,60	364 714,82	387 340,04	410 969,89
Batu	9 145,95	9 750,91	10 390,84	11 066,48	11 787,51
Jawa Timur	1 331 376,10	1 405 563,51	1 482 299,58	1 563 769,10	1 650 143,15

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik/ BPS-Statistics of Indonesia

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2019-2023

Tabel 13.2.2
Table

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (miliar rupiah), 2019-2023
Gross Regional Domestic Product at Constant 2010 Prices by Regency/Municipality in Jawa Timur Pro (billion rupiahs), 2019-2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022 *	2023 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Pacitan	11.040,77	10.837,87	11.107,40	11.722,44	12.244,97
Ponorogo	14.297,10	14.168,62	14.619,97	15.093,71	15.870,05
Trenggalek	12.779,45	12.502,39	12.959,02	13.545,41	14.212,06
Tulungagung	27.299,80	26.455,76	27.390,42	28.818,91	30.234,61
Blitar	25.530,11	24.945,46	25.700,02	27.037,33	28.239,86
Kediri	29.193,72	28.490,95	29.361,67	30.800,71	32.195,50
Malang	68.379,67	66.545,47	68.619,10	72.136,46	75.744,29
Lumajang	22.563,39	21.933,79	22.623,40	23.626,58	24.808,35
Jember	54.200,04	52.586,56	54.688,72	57.167,13	59.984,00
Banyuwangi	55.274,03	53.295,11	55.472,57	57.932,55	60.848,35
Bondowoso	13.637,36	13.451,77	13.921,65	14.410,20	15.075,62
Situbondo	13.599,57	13.282,84	13.715,83	14.318,00	15.018,99
Probolinggo	23.395,25	22.898,24	23.664,39	24.734,19	25.904,93
Pasuruan	105.289,18	103.152,80	107.630,27	113.352,08	119.252,55
Sidoarjo	140.492,94	135.305,32	141.000,36	151.613,88	160.950,78
Mojokerto	58.467,15	57.818,42	60.198,70	63.699,84	66.982,68
Jombang	28.216,18	27.657,58	28.553,45	30.086,17	31.602,77
Nganjuk	18.304,20	17.990,36	18.640,68	19.543,18	20.598,57
Madiun	13.161,84	13.146,12	13.582,73	14.169,62	14.895,81
Magetan	13.237,47	13.020,89	13.417,03	13.939,15	14.562,68
Ngawi	13.710,89	13.479,74	13.823,46	14.264,44	14.904,51
Bojonegoro	69.985,68	69.703,42	65.839,51	61.782,87	63.310,69
Tuban	45.356,09	42.705,01	43.984,69	47.890,26	49.980,23
Lamongan	27.706,16	26.972,65	27.896,54	29.447,44	30.709,18
Gresik	101.346,55	97.616,60	101.318,69	108.796,88	113.825,43
Bangkalan	18.550,80	17.514,62	17.152,78	16.959,91	17.164,20
Sampang	13.994,78	13.953,74	13.984,57	14.308,28	14.674,11
Pamekasan	11.407,36	11.117,62	11.496,24	12.031,56	12.628,69
Sumenep	23.816,44	23.546,51	24.161,35	24.912,62	26.244,79
Kota/Municipality					
Kediri	90.001,52	84.374,98	86.485,59	89.907,21	91.631,35
Blitar	4.832,89	4.722,55	4.924,57	5.181,61	5.455,81
Malang	52.334,75	51.154,53	53.309,70	56.678,64	60.119,82
Probolinggo	8.338,77	8.035,27	8.361,14	8.872,84	9.408,51
Pasuruan	5.964,66	5.706,60	5.914,59	6.282,38	6.637,08
Mojokerto	4.985,68	4.801,46	4.976,49	5.253,00	5.399,62
Madiun	10.623,07	10.055,91	10.537,70	11.119,55	11.764,40
Surabaya	410.879,31	390.936,42	407.725,83	434.268,34	459.030,72
Batu	11.786,65	11.025,81	11.471,43	12.180,93	12.934,60

Catatan/Note : * angka sementara / preliminary figure
** sangat sementara / very preliminary figure

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

c. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2016-2019

Tabel 13.2.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (persen), 2016–2019
Table 13.2.3 Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Regency/Municipality in Jawa Timur Province (percent), 2016–2019

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
Pacitan	5,21	4,98	5,51	5,08
Ponorogo	5,29	5,10	5,31	5,01
Trenggalek	5,00	5,02	5,03	5,08
Tulungagung	5,02	5,08	5,21	5,32
Blitar	5,08	5,08	5,10	5,12
Kediri	5,02	4,90	5,08	5,07
Malang	5,30	5,43	5,56	5,50
Lumajang	4,70	5,05	5,02	4,77
Jember	5,23	5,11	5,23	5,31
Banyuwangi	5,38	5,45	5,84	5,55
Bondowoso	4,97	5,03	5,10	5,29
Situbondo	5,00	5,07	5,47	5,45
Probolinggo	4,77	4,46	4,47	4,56
Pasuruan	5,44	5,72	5,79	5,83
Sidoarjo	5,51	5,81	6,02	5,99
Mojokerto	5,49	5,73	5,89	5,81
Jombang	5,40	5,36	5,44	5,06
Nganjuk	5,29	5,26	5,39	5,36
Madiun	5,27	5,42	5,10	5,42
Magetan	5,31	5,09	5,22	5,04
Ngawi	5,21	5,07	5,21	5,05
Bojonegoro	21,95	10,25	4,40	6,34
Tuban	4,90	4,98	5,17	5,14
Lamongan	5,86	5,50	5,45	5,44
Gresik	5,49	5,83	5,97	5,41
Bangkalan	0,66	3,53	4,22	1,03
Sampang	6,17	4,69	4,56	1,42
Pamekasan	5,36	5,04	5,46	4,92
Sumenep	2,58	2,86	3,63	0,14
Kota/Municipality				
Kediri	5,54	5,14	5,43	5,47
Blitar	5,77	5,78	5,83	5,84
Malang	5,61	5,69	5,72	5,73
Probolinggo	5,88	5,88	5,94	5,94
Pasuruan	5,46	5,47	5,54	5,56
Mojokerto	5,77	5,65	5,80	5,75
Madiun	5,90	5,94	5,96	5,69
Surabaya	6,00	6,13	6,20	6,10
Batu	6,61	6,56	6,50	6,52
Jawa Timur	5,57	5,46	5,50	5,52

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik/ BPS-Statistics of Indonesia

d. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020-2023

Tabel 13.2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (persen), 2020–2023
Table 13.2.4 Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Regency/Municipality in Jawa Timur Province (percent), 2020–2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022 *	2023 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
Pacitan	-1,84	2,49	5,54	4,46
Ponorogo	-0,90	3,19	3,24	5,14
Trenggalek	-2,17	3,65	4,52	4,92
Tulungagung	-3,09	3,53	5,22	4,91
Blitar	-2,29	3,02	5,20	4,45
Kediri	-2,41	3,06	4,90	4,53
Malang	-2,68	3,12	5,13	5,00
Lumajang	-2,79	3,14	4,43	5,00
Jember	-2,98	4,00	4,53	4,93
Banyuwangi	-3,58	4,09	4,43	5,03
Bondowoso	-1,36	3,49	3,51	4,62
Situbondo	-2,33	3,26	4,39	4,90
Probolinggo	-2,12	3,35	4,52	4,73
Pasuruan	-2,03	4,34	5,32	5,21
Sidoarjo	-3,69	4,21	7,53	6,16
Mojokerto	-1,11	4,12	5,82	5,15
Jombang	-1,98	3,24	5,37	5,04
Nganjuk	-1,71	3,61	4,84	5,40
Madiun	-0,12	3,32	4,32	5,12
Magetan	-1,64	3,04	3,89	4,47
Ngawi	-1,69	2,55	3,19	4,49
Bojonegoro	-0,40	-5,54	-6,16	2,47
Tuban	-5,85	3,00	8,88	4,36
Lamongan	-2,65	3,43	5,56	4,28
Gresik	-3,68	3,79	7,38	4,62
Bangkalan	-5,59	-2,07	-1,12	1,20
Sampang	-0,29	0,22	2,31	2,56
Pamekasan	-2,54	3,41	4,66	4,96
Sumenep	-1,13	2,61	3,11	5,35
Kota/Municipality				
Kediri	-6,25	2,50	3,96	1,92
Blitar	-2,28	4,28	5,22	5,29
Malang	-2,26	4,21	6,32	6,07
Probolinggo	-3,64	4,06	6,12	6,04
Pasuruan	-4,33	3,64	6,22	5,65
Mojokerto	-3,69	3,65	5,56	2,79
Madfun	-5,34	4,79	5,52	5,80
Surabaya	-4,85	4,29	6,51	5,70
Batu	-6,46	4,04	6,18	6,19

Catatan/Note : * angka sementara / preliminary figure
 ** sangat sementara / very preliminary figure

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

e. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2019-2023

Tabel 13.2.6 **Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah), 2019–2023**
Per Capita Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Regency/Municipality (thousand rupiahs), 2019–2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022 *	2023 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Pacitan	19.875	18.519	18.940	19.961	20.826
Ponorogo	16.349	14.956	15.361	15.792	16.540
Trenggalek	18.346	17.126	17.658	18.363	19.175
Tulungagung	26.262	24.322	25.018	26.165	27.292
Blitar	21.987	20.421	20.851	21.748	22.528
Kediri	18.538	17.451	17.790	18.510	19.196
Malang	26.220	25.108	25.680	26.774	27.892
Lumajang	21.645	19.639	20.111	20.868	21.778
Jember	22.106	20.763	21.439	22.251	23.188
Banyuwangi	34.243	31.258	32.215	33.427	34.892
Bondowoso	17.573	17.345	17.861	18.384	19.128
Situbondo	19.904	19.382	19.904	20.656	21.547
Probolinggo	20.011	19.883	20.410	21.171	22.010
Pasuruan	64.657	64.295	66.551	69.493	72.518
Sidoarjo	62.346	65.044	67.104	71.340	74.908
Mojokerto	52.267	51.746	53.425	56.059	58.477
Jombang	22.324	21.021	21.510	22.460	23.387
Nganjuk	17.355	16.322	16.798	17.491	18.315
Madiun	19.274	17.703	18.180	18.869	19.743
Magetan	20.889	19.439	19.919	20.569	21.364
Ngawi	16.379	15.509	15.832	16.264	16.923
Bojonegoro	55.996	53.621	50.376	47.037	47.976
Tuban	38.662	35.690	36.529	39.528	41.015
Lamongan	23.092	20.122	20.644	21.643	22.423
Gresik	77.109	74.609	76.638	81.411	84.291
Bangkalan	18.786	16.573	16.038	15.693	15.721
Sampang	14.280	14.418	14.273	14.418	14.608
Pamekasan	12.950	13.094	13.408	13.882	14.419
Sumenep	21.864	20.970	21.339	21.861	22.890
Kota/Municipality					
Kediri	312.824	294.533	299.129	307.692	310.378
Blitar	34.043	31.744	32.765	34.125	35.575
Malang	60.077	60.637	62.733	66.087	69.480
Probolinggo	35.124	33.595	34.593	36.312	38.094
Pasuruan	29.741	27.496	28.122	29.444	30.670
Mojokerto	38.509	36.324	37.284	38.964	39.672
Madiun	59.981	51.666	53.656	56.106	58.825
Surabaya	141.817	136.074	141.206	149.752	157.665
Batu	56.730	51.873	53.356	55.974	58.741

Catatan/Note : * angka sementara / preliminary figure
 ** sangat sementara / very preliminary figure

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

f. PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	167360.57	163799.94	165951.23	167631.24	170556.77
Pertambangan dan Penggalian	80636.38	82573.56	83847.02	80897.97	77270.04
Industri Pengolahan	434114.16	466908.04	498740.30	488376.56	504889.13
Pengadaan Listrik dan Gas	4599.54	4499.00	4561.03	4451.89	4711.10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1454.64	1515.43	1586.73	1666.53	1761.00
Konstruksi	136136.39	145140.20	153689.59	148652.44	152417.90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	273213.40	290136.30	307440.92	289656.36	312154.69
Transportasi dan Pergudangan	43835.33	46712.45	48471.40	43466.26	44556.66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79202.19	85237.50	91659.39	83548.62	86108.36
Informasi dan Komunikasi	84699.18	90416.22	97070.64	106612.55	113956.93
Jasa Keuangan dan Asuransi	38064.50	39859.92	41374.53	41449.26	42116.04
Real Estate	25247.60	26823.05	28441.50	29565.69	30241.30
Jasa Perusahaan	11486.87	12308.51	13128.02	12180.02	12466.40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	32369.74	33730.19	34984.34	34848.51	34948.54
Jasa Pendidikan	38931.65	41036.23	44018.96	45760.00	46185.09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9743.84	10485.66	11277.80	12239.46	12847.31
Jasa Lainnya	21203.59	22259.62	23652.24	20389.19	21567.09
Produk Domestik Regional Bruto	1482299.58	1563441.82	1649895.64	1611392.55	1668754.36

g. PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13841697.61	13845119.72	14046579.39	13895893.60	13881229.33
Pertambangan dan Penggalian	2427179.88	2564804.27	2588326.81	2417337.10	2445019.26
Industri Pengolahan	10258479.67	10888408.27	11656829.52	10867314.50	11745486.44
Pengadaan Listrik dan Gas	26576.75	27878.63	29322.93	29477.80	30155.74
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31448.02	33435.53	35575.41	37023.30	39718.23
Konstruksi	3404782.96	3667654.90	3994998.45	3725622.90	3804073.88
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6344248.12	6875844.02	7410804.46	6990664.10	7569414.22
Transportasi dan Pergudangan	764707.66	822185.60	892766.94	838740.60	902519.44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1092506.07	1191208.45	1309024.09	1135417.40	1169974.68
Informasi dan Komunikasi	3574299.51	3864890.06	4225313.81	4648802.00	5007460.00
Jasa Keuangan dan Asuransi	1078944.48	1138422.32	1189960.28	1188495.60	1205049.92
Real Estate	694383.41	739377.60	788620.15	808538.00	824206.29
Jasa Perusahaan	160824.13	172458.10	185237.25	176379.20	180173.48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1699563.94	1816493.34	1872518.23	1830945.70	1829920.04
Jasa Pendidikan	2558469.32	2717985.77	2903624.20	2976291.30	3020513.53
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	371952.57	398486.59	429050.51	468925.60	460341.37
Jasa Lainnya	572895.67	605864.00	641488.80	550689.10	573463.27
Produk Domestik Regional Bruto	48912959.78	51370517.20	54200041.26	52586557.70	54688719.13

h. PDRB Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15 112,57	15 493,02	15 406,89	14 950,32	15 205,35
Pertambangan dan Penggalian	4 512,72	4 452,01	4 537,98	4 217,40	4 284,78
Industri Pengolahan	7 371,22	6 053,06	6 529,09	6 504,55	7 026,82
Pengadaan Listrik dan Gas	31,60	28,22	29,16	29,07	29,61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41,62	33,75	35,54	37,33	39,50
Konstruksi	7 647,76	6 480,90	7 279,34	6 883,65	7 179,57
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9 761,45	8 307,60	9 105,39	8 505,87	9 112,10
Transportasi dan Pergudangan	1 701,25	1 560,39	1 653,50	1 455,06	1 450,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 609,21	1 403,08	1 559,99	1 343,94	1 401,86
Informasi dan Komunikasi	3 845,43	2 867,27	3 126,16	3 397,12	3 652,23
Jasa Keuangan dan Asuransi	1 018,38	947,34	987,16	984,55	1 001,78
Real Estate	980,24	830,06	885,09	901,97	930,06
Jasa Perusahaan	132,69	124,80	133,08	124,93	127,65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 117,21	1 133,61	1 158,67	1 115,98	1 106,38
Jasa Pendidikan	1 984,63	1 760,73	1 886,45	1 945,44	1 978,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	279,31	210,14	223,21	257,93	269,93
Jasa Lainnya	785,26	681,71	737,34	640,02	676,06
Produk Domestik Regional Bruto	57 932,55	52 367,70	55 274,03	53 295,11	55 472,57

i. PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3753205.80	3767505.28	3826563.17	3746676.56	3810013.31
Pertambangan dan Penggalian	239802.60	248978.23	254268.00	237521.57	240500.30
Industri Pengolahan	2067764.80	2281752.08	2495190.60	2574531.15	2670744.45
Pengadaan Listrik dan Gas	8810.00	9076.85	9408.82	9373.64	9564.64
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16125.70	16801.71	17521.08	18205.89	19139.86
Konstruksi	922455.30	975137.51	1030253.71	955219.92	949425.82
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1995221.20	2152494.62	2304890.29	2104262.83	2250186.12
Transportasi dan Pergudangan	314950.30	343806.59	369654.68	340288.52	363564.27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	220887.00	239366.36	257124.84	223542.50	232762.99
Informasi dan Komunikasi	771825.90	828707.47	890603.40	960591.39	1021182.07
Jasa Keuangan dan Asuransi	382714.40	408269.57	422360.28	421743.82	426369.02
Real Estate	206852.20	219986.78	233812.38	240889.51	245961.50
Jasa Perusahaan	52999.70	57222.39	60920.09	56356.45	57206.44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	404466.60	420206.69	433666.53	425697.34	425374.20
Jasa Pendidikan	498090.00	530755.52	567794.07	578669.37	586104.58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109385.00	115173.18	120690.62	131822.51	138156.94
Jasa Lainnya	264902.90	282683.73	304849.69	257443.93	269577.65
Produk Domestik Regional Bruto	12230459.30	12897924.58	13599572.27	13282836.89	13715834.17

j. PDRB Kabupaten Bondowoso Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3623732.59	3635763.50	3679864.49	3729456.46	3818351.88
Pertambangan dan Penggalian	253847.57	263366.85	269793.00	252968.62	257486.28
Industri Pengolahan	2714362.23	2968651.46	3224568.43	3235134.23	3358392.18
Pengadaan Listrik dan Gas	6144.36	6402.27	6775.50	6781.43	6940.18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9910.70	10422.10	10914.02	11346.15	12062.55
Konstruksi	1051997.27	1109751.92	1175338.25	1103620.01	1107775.44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1975852.82	2101814.86	2234867.49	2050857.35	2182660.08
Transportasi dan Pergudangan	90314.64	98117.96	106269.59	101089.66	113590.10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86768.87	93083.27	100505.53	82231.39	83996.54
Informasi dan Komunikasi	779896.43	836360.93	899757.09	974900.79	1041682.42
Jasa Keuangan dan Asuransi	362508.15	381831.47	396984.62	395122.30	399271.23
Real Estate	151591.86	160202.27	168725.04	173404.99	175910.03
Jasa Perusahaan	44620.22	47525.00	50504.82	46839.32	47613.58
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	413852.68	432020.82	448567.21	437463.98	440125.63
Jasa Pendidikan	441596.05	469637.40	505752.51	518536.98	529622.21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94751.88	101204.48	107661.33	116623.83	121784.85
Jasa Lainnya	223916.60	235358.73	250515.84	215393.06	224389.09
Produk Domestik Regional Bruto	12325664.92	12951515.29	13637364.77	13451770.54	13921654.24

C. Output Hasil Olahan Data

1. Hasil Analisis Location Quotient Kabupaten Jember Tahun 2017-2021

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,506387715	2,572472634	2,576599749	2,540340198	2,483953634	2,535950786
Pertambangan dan Penggalian	0,912185119	0,9453247	0,939698074	0,915732409	0,965766461	0,935741352
Industri Pengolahan	0,716128722	0,709742531	0,711480236	0,681811915	0,710043758	0,705841432
Pengadaan Listrik dan Gas	0,17510539	0,18859198	0,195704717	0,202912269	0,195360459	0,191534963
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,655163695	0,671490879	0,682501702	0,680800167	0,688366189	0,675664526
Konstruksi	0,757926767	0,769074717	0,791277872	0,768041197	0,761731594	0,769610429
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,703704302	0,721259812	0,733770995	0,739464891	0,739545139	0,727549028
Transportasi dan Pergudangan	0,528668218	0,535679475	0,560672679	0,59133428	0,618334108	0,566937752
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,418021588	0,425328856	0,434737931	0,416460607	0,414686737	0,421847144
Informasi dan Komunikasi	1,27886228	1,300943945	1,325036781	1,336258195	1,34111416	1,316443072
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,85899574	0,869230118	0,8755002	0,878695618	0,872872131	0,871058761
Real Estate	0,833472505	0,83893037	0,844057882	0,83805029	0,831810634	0,837264336
Jasa Perusahaan	0,42428878	0,426428184	0,429522534	0,443769071	0,441101779	0,433022069
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,591147128	1,639014549	1,629330649	1,610085409	1,598056301	1,613526807

Jasa Pendidikan	1,991541888	2,01580032	2,007971237	1,993182579	1,989572523	1,999613709
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,156829786	1,156606759	1,158086214	1,174084485	1,093595721	1,147840593
Jasa Lainnya	0,81880066	0,828371575	0,825607556	0,827683259	0,811527154	0,822398041
Produk Domestik Regional Bruto	1	1	1	1	1	1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Hasil Analisis Location Quotient Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

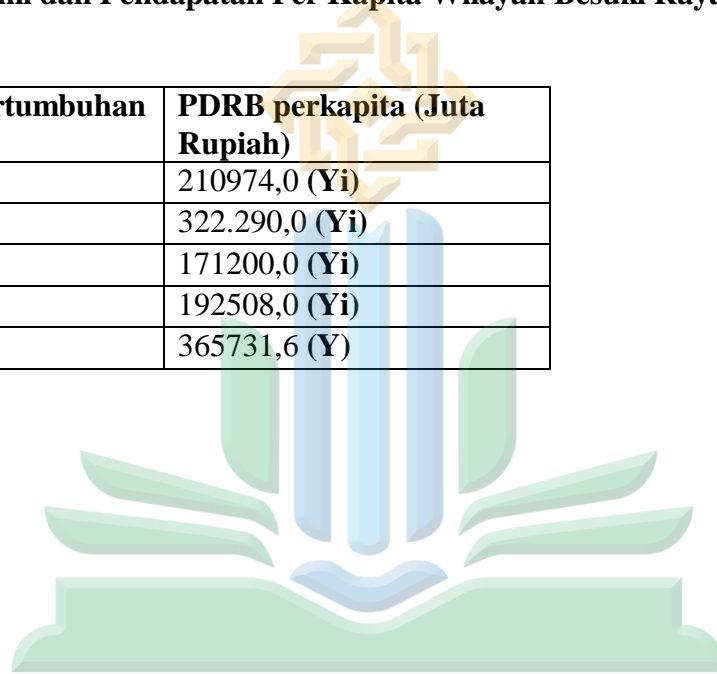
Kategori	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,237002223	1,140613674	1,027653457	1,044168756	0,975762382	1,085040098
Pertambangan dan Penggalian	0,164037867	0,149526721	0,135151961	0,137168223	0,135958849	0,144368724
Industri Pengolahan	0,262735304	0,242345826	0,222970568	0,246240561	0,231072606	0,241072973
Pengadaan Listrik dan Gas	0,105653224	0,100050119	0,091937038	0,098365001	0,088682378	0,096937552
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,611482874	0,549814319	0,492125779	0,510358711	0,474755958	0,527707528
Konstruksi	0,373759593	0,333178208	0,298756946	0,300198199	0,272092197	0,315597028
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,40281933	0,367907337	0,334123378	0,339326829	0,314646481	0,351764671
Transportasi dan Pergudangan	0,396313616	0,364989183	0,339882592	0,365739425	0,356492056	0,364683374
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,153834666	0,139261431	0,125021685	0,124996421	0,118075456	0,132237932
Informasi dan Komunikasi	0,502645027	0,454520368	0,40889776	0,420927318	0,391429418	0,435683978
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,554594964	0,507936043	0,454954821	0,475344748	0,442011179	0,486968351
Real Estate	0,451919718	0,406711887	0,366381285	0,380633162	0,355269315	0,392183074
Jasa Perusahaan	0,254503028	0,230546722	0,206813832	0,216158531	0,200444843	0,221693391
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,689230838	0,617792479	0,552459563	0,570681082	0,531658951	0,592364583
Jasa Pendidikan	0,705709981	0,641394906	0,57486961	0,590773809	0,552530335	0,613055728
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61922556	0,544695803	0,476944017	0,503157642	0,46973349	0,522751303
Jasa Lainnya	0,689125884	0,629769334	0,574422915	0,589874249	0,545988323	0,605836141
Produk Domestik Regional Bruto	0,455122209	0,409106661	0,367355926	0,385066012	0,358943833	0,395118928

4. Hasil Analisis Location Quotient Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,051563569	1,155244927	1,018029207	1,03848067	0,963037936	1,045271
Pertambangan dan Penggalian	0,651736894	0,658516156	0,593470984	0,60698528	0,599053517	0,621953
Industri Pengolahan	0,197724486	0,158340353	0,143547237	0,155097455	0,150348765	0,161012
Pengadaan Listrik dan Gas	0,000810165	0,000760141	0,000697201	0,075851776	0,000687899	0,015761
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,336226361	0,002740282	0,248783801	0,002585239	0,002453729	0,118558
Konstruksi	0,654201665	0,545389273	0,519337757	0,539238636	0,508878853	0,553409
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,416035426	0,349741128	0,324743831	0,341943609	0,315333259	0,349559
Transportasi dan Pergudangan	0,451874703	0,40789111	0,374173109	0,389783007	0,351545309	0,395053
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,236568464	0,201038509	0,186625192	0,187314833	0,17588493	0,197486
Informasi dan Komunikasi	0,528634051	0,387287637	0,353121135	0,371021774	0,34619115	0,397251
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,311433728	0,290178909	0,26158131	0,276714318	0,257007694	0,279383
Real Estate	0,452005761	0,377939445	0,341203443	0,35524723	0,332206729	0,371721
Jasa Perusahaan	0,134830433	0,124038589	0,111090019	0,11950173	0,110916165	0,120075
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,401838883	0,410626104	0,363272382	0,372899811	0,34186294	0,3781
Jasa Pendidikan	0,593739164	0,524136239	0,469812472	0,494932271	0,462881617	0,5091
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,333435668	0,244610903	0,21682188	0,245453727	0,227026991	0,25347
Jasa Lainnya	0,431120083	0,374213039	0,341678649	0,365504041	0,338595419	0,370222
Produk Domestik Regional Bruto	0,455122209	0,409106661	0,367355926	0,385121086	0,359099808	0,395161

4. Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita Wilayah Besuki Raya Tahun 2017-2021 (Analisis Tipologi Klassen)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan (persen)	PDRB perkapita (Juta Rupiah)
Kabupaten Jember	2,29 (Ri)	210974,0 (Yi)
Kabupaten Banyuwangi	2,09 (Ri)	322.290,0 (Yi)
Kabupaten Bondowoso	3,14 (Ri)	171200,0 (Yi)
Kabupaten Situbondo	2,92 (Ri)	192508,0 (Yi)
Jawa Timur	2,59 (R)	365731,6 (Y)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2017

Indeks Williamson Wilayah Besuki Raya Tahun 2017							
Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB (Ribu Rupiah)	PDRB per kapita (rupiah pertahun)	Proporsi Penduduk			
	f_i	P_i	$y_i = p_i/f_i$	f_i/n	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	$(y_i - y)^2(f_i/n)$
Kabupaten Jember	2430185	4891295978	2012725771	0,06184783	-245479932,4	60260397208479800	3726974816694050
Kabupaten Banyuwangi	1604897	5793255	3609736326	0,040844379	1351530622	1826635022960730000	74607773192935700
Kabupaten Bondowoso	768912	1232566492	1603000723	0,019568691	-655204980,4	429293566312482000	8400713060370600
Kabupaten Situbondo	676703	1223045930	1807359994	0,017221986	-450845709,5	203261853781005000	3500572818460780
	39292971		2258205703				90236033888461100
							300393132
							0,133022927

6. Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2018

Indeks Williamson Wilayah Besuki Raya Tahun 2018							
Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB (Ribu Rupiah)	PDRB per kapita (rupiah pertahun)	Proporsi Penduduk			
	f_i	P_i	$y_i = p_i/f_i$	f_i/n	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	$(y_i - y)^2(f_i/n)$
Kabupaten Jember	2440714	5137051720	2104733172	0,061788897	-128222682	16441056181141100	1015874721182530
Kabupaten Banyuwangi	1609677	5236770	3253304856	0,040750439	1020349001	1041112084292540000	64329166976731600
Kabupaten Bondowoso	772297	1295151529	1677012249	0,019551402	-555943605,2	309073292135984000	19097297704861800
Kabupaten Situbondo	679993	1289792458	1896773140	0,017214642	-336182714	113018817217779000	6983308016500060
	39500851		2232955854				91425647419275900
							302366743
							0,135410981

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2019

Indeks Williamson Wilayah Besuki Raya Tahun 2019							
Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB (Juta Rupiah)	PDRB per kapita (rupiah perta	Proporsi Penduduk			
	f_i	P_i	$y_i = p_i/f_i$	f_i/n	$y_i - \bar{y}$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)$
Kabupaten Jember	2450668	5420004126	2211643571	0,061731801	-134751063,6	18157849127864400	1120916734042670
Kabupaten Banyuwangi	1613991	5527403	3424680187	0,040656087	1078285553	1162699733780880000	71775548914654500
Kabupaten Bondowoso	775715	1363736477	1758038038	0,019540094	-588356595,7	346163483757971000	21369295389913600
Kabupaten Situbondo	682978	1359957227	1991216741	0,017204069	-355177893,7	126151336166795000	7787549215518500
	39698631		2346394634				102053310254129000
							319457838
							0,136148384

8. Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2020

Indeks Williamson Wilayah Besuki Raya Tahun 2020							
Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB (Ribu Rupiah)	PDRB per kapita (rupiah pertahun)	Proporsi Penduduk			
	f_i	P_i	$y_i = p_i/f_i$	f_i/n	$y_i - \bar{y}$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)$
Kabupaten Jember	2536729	5258655770	2073006525	0,062380071	-142649964,5	20349012377376600	1269372835006930
Kabupaten Banyuwangi	1708114	5329511	3120114348	0,042003806	904457858,5	#####	51029643834956300
Kabupaten Bondowoso	776151	1345177054	1733138338	0,019086136	-482518152,1	#####	14523563099911100
Kabupaten Situbondo	685967	1328283689	1936366748	0,016868444	-279289741,9	78002759924255700	4865817695088690
	40665696		2215656490				71688397464963100
							267746891
							0,120843141

9. Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2021

Indeks Williamson Wilayah Besuki Raya Tahun 2021							
Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB (Ribu Rupiah)	PDRB per kapita (rupiah pertahun)	Proporsi Penduduk			
	f_i	P_i	$y_i = p_i/f_i$	f_i/n	$y_i - \bar{y}$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)$
Kabupaten Jember	2550360	5468871913	2144352920	0,062388345	-143947664,6	20720930141942500	1292744542819130
Kabupaten Banyuwangi	1718462	5547257	3228035883	0,042037987	939735298,7	883102431576917000	55095299359198400
Kabupaten Bondowoso	778525	1392165424	1788209016	0,019044718	-500091568,8	250091577191344000	15602799652546400
Kabupaten Situbondo	688337	1371583417	1992604519	0,016838488	-295696065,3	87436163019432100	5454997522510730
	40878789		2288300585				77445841077074600
							278290929
							0,121614674



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

10. Hasil Analisis Korelasi Pearson Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ketimpangan Tahun 2017-2021

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 04/14/24 Time: 11:11

Sample: 2017 2021

Included observations: 5

Correlation

Probability

X

X

1.000000

Y

0.772440

0.1258

Y

1.000000

data diolah penulis menggunakan Eviews9



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nomor : B-~~399~~ /Un.22/7.d/PP.00.9/04/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 April 2024

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN KHAS Jember

Jl. Mataram No. 01 Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Ridwan Firmansyah
NIM : 204105020086
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : "Analisis Potensi Sektor Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Wilayah Besuki Raya Tahun 2017-2021"

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset pada tanggal 01-30 Mei 2024 dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari:

<https://jatim.bps.go.id/indicator/162/529/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota.html>

<https://jatim.bps.go.id/indicator/162/328/1/-seri-2010-pdrb-perkapita-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota.html>

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha



Syahrul Mulyadi

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., MM
Jabatan : Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Ahmad Ridwan Firmansyah
NIM : 204105020086
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian melalui website Badan Statistik Untuk memperoleh data dalam rangka Penelitian/Riset mengenai "Analisis Potensi Sektor Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Wilayah Besuki Raya Tahun 2017-2021" dengan data sekunder yang bersumber dari :

<https://jatim.bps.go.id/indicator/162/529/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota.html>

<https://jatim.bps.go.id/indicator/162/328/1/-seri-2010-pdrb-perkapita-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota.html>.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 Mei 2024

A.n. Dekan

Plt Ketua Jurusan Ekonomi Islam,



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., MM

JURNAL PENELITIAN

Nama : Ahmad Ridwan Firmansyah
NIM : 204105020086
Judul Penelitian : Analisis Potensi Sektor Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Wilayah Besuki Raya Tahun 2017-2021

No	Tanggal	Kegiatan
1.	17 April 2024	Mencari data di website BPS terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2019
2.	18 April 2024	Mencari data di website BPS terkait pertumbuhan ekonomi menurut sektor lapangan usaha tahun 2017-2019
3.	24 April 2024	Mencari data di website BPS terkait jumlah proporsi penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2019
4.	25 April 2024	Mengolah data yang telah diperoleh pada alat bantu hitung dan software E-Views 9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 27 Mei 2024
Penulis
J E M B E R

Ahmad Ridwan Firmansyah
NIM.204105020086



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Ridwan Firmansyah
NIM : 204105020086
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis potensi sektor ekonomi daerah dan ketimpangan pendapatan kabupaten wilayah Besuki Raya tahun 2017-2021

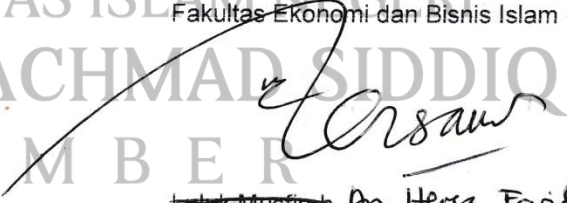
Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Mei 2024

Operator Aplikasi DrillBit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Dr. Hersa Farida





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Ridwan Firmansyah

NIM : 204105020086

Semester : VIII (delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 29 Mei 2024
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,


Sofiah M.E
NIP. 199105152019032005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Ridwan Firmansyah
Alamat : Jalan Kacapiring I/59 Lingkungan Gebang
Tengah Kelurahan Gebang, Kecamatan
Patrang, Kabupaten Jember
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Januari 2002
NIM : 204105020086
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Riyadlus Solihin : 2005 - 2007
2. SDN Jember Kidul IV : 2007 - 2013
3. SMPN Sukorambi : 2013 - 2016
4. SMAN 5 Jember : 2016 - 2019
5. UIN KHAS Jember : 2020 - Sekarang